



2025

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2025-2029



**KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025**



**BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan harus ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor beserta nomenklatur perubahannya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang perencanaan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah penanggung jawab urusan perencanaan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

10. Rencana ...

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
20. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan Profil pembangunan Daerah.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan Daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui Program pembangunan Daerah tahunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

- a. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
- b. Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029; dan
- c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2025 dan Renja PD tahun 2026-2030;

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (3) Kepala Badan atau sebutan lainnya melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan dari Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.

Bagian Kedua

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.
- (3) Kepala Badan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB V ...

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

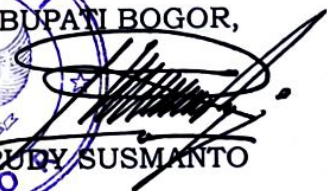
- (1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPJMD dan RKPD.
- (2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2025


BUPATI BOGOR,

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



AJAT ROCHMAT JAINIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman bagi DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta penyelenggaraan program keluarga berencana. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 serta selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender, ramah anak, serta mendukung terwujudnya keluarga berkualitas dan pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang. Melalui Renstra ini, ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur serta berorientasi pada hasil (outcome), guna menjawab berbagai tantangan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga mitra, organisasi masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi yang telah memberikan masukan konstruktif dalam proses perencanaan ini.

Harapan kami, Renstra DP3AP2KB Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman kerja yang efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta mampu mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, penguatan ketahanan keluarga, serta

terwujudnya keseimbangan penduduk demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Cibinong, 28 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana



Ir. Sussy Rahayu Agustini, M.T.
NIP. 196808201995032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAPHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-12
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-12
BAB II GAMBARAN PELAYANANM PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB).....	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan DP3AP2KB.....	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur DP3AP2KB	II-1
2.1.2. Sumber Daya DP3AP2KB	II-20
2.1.3. Kinerja Pelayanan DP3AP2KB.....	II-25
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	II-80
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-81
2.2.1. Permasalahan.....	II-81
2.2.2 Isu Strategis	II-81
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..	III-1
3.1. Tujuan Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029	III-1
3.2. Sasaran Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029.....	III-3
3.3. Arah Kebijakan DP3AP2KB dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029	III-7
3.4. Strategi DP3AP2KB dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029.....	III-9

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYERENGGAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DP3AP2KB Tahun 2025-2029	IV-1
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) DP3AP2KB	IV-75
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	II-20
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Jabatan UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..	II-21
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menurut Pangkat, Jabatan, dan Jenis Kelamin	II-21
Tabel 2.4	Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Menurut Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-23
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024	II-28
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2.7	Kelompok Sasaran Layanan DP3AP2KB	II-80
Tabel 2.8	Kertas Kerja Perumusan Permasalahan DP3AP2KB	II-81
Tabel 2.9	Kertas Kerja Perumusan Isu Strategis DP3AP2KB.....	II-83
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran DP3AP2KB Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.2	Arah Kebijakan DP3AP2KB	III-7
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Berdasarkan Penahapan Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2030.....	III-10
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DP3AP2KB	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2030	IV-31
Tabel 4.3	Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....	IV-67
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB	IV-76
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci DP3AP2KB	IV-78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD	I-2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-19

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan:

- (1) Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (3) Penyesuaian Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai hasil konsultasi publik RPJMD;
- (4) Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- (5) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- (6) Verifikasi Rancangan Renstra PD;
- (7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (8) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029;

- (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
- (10) Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 serta Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 sampai dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra DP3AP2KB yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DP3AP2KB Periode 2026-2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra DP3AP2KB adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
11. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
23. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

24. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

- Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 44. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional;
 45. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Siste Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 46. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 47. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 48. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 49. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 50. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 53. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 54. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 55. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ; Tahun 2021 Nomor 910) ; Tahun 2021 Nomor 910);
62. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
63. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
64. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

- 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
76. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bogor;

77. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
78. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 25);
79. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mendukung pelaksanaan tahapan pertama perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD mulai tahun 2025 hingga tahun 2030;
2. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Renstra DP3AP2KB Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)

- 2.1. Gambaran Pelayanan DP3AP2KB
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur DP3AP2KB
 - 2.1.2. Sumber Daya DP3AP2KB
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan DP3AP2KB
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1. Permasalahan
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah DP3AP2KB Kabupaten Bogor tahun 2025-2029.

- 3.1. Tujuan Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029
- 3.3. Arah Kebijakan DP3AP2KB dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AP2KB tahun 2025- 2029
- 3.4. Strategi DP3AP2KB dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AP2KB tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN UNSUR KEWILAYAHAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai

- 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DP3AP2KB Tahun 2025-2029
- 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) DP3AP2KB

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan tentang tujuan dan kesimpulan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)

2.1. Gambaran Pelayanan DP3AP2KB

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur DP3AP2KB

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Tugas Pembantuan.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

2. SEKRETARIAT

Bagian Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;

- g. pengelolaan situs *web* Dinas;
- h. pelaksanaan dan pengordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan administrasi kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- c. pengelolaan barang/jasa Dinas;
- d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
- g. monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. penatausahaan keuangan Dinas;
- c. pengordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- d. penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok substansi Program dan Pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Program dan Pelaporan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Substansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c. mengelola penyusunan anggaran Dinas; dan
- d. mengelola situs *web* Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. BIDANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;

- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender membawahkan:

1) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga. Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

- a. Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan;
- b. Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- c. Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga;

Masing-masing kelompok substansi dipimpin dan dikoordinasikan oleh Seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur :

- a. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan;
- b. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- c. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga;

- (1) Sub Koordinator Perlindungan Perempuan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dalam:
 - (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perlindungan perempuan;
 - (b) melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan;
 - (c) meminimalisir kekerasan terhadap perempuan;
 - (d) menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
 - (e) melaksanakan koordinasi pengelolaan perlindungan perempuan;
 - (f) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - (g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam:
 - (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - (b) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - (c) melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - (d) melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan serta pendampingan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan peningkatan

partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;

- (e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam :

- (a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas keluarga;
- (b) melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- (c) menyediakan, menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- (d) membina dan memfasilitasi pengelolaan peningkatan kualitas keluarga;
- (e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak;

- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak membawahkan

1) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak. Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

- a. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;
- b. Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak; dan
- c. Kelompok Substansi Data dan Informasi Gender dan Anak.

Masing-masing kelompok substansi dipimpin dan diikoordinasikan oleh Seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur :

- a. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;
- b. Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak; dan
- c. Sub Koordinator Data dan Informasi Gender dan Anak.

- (1) Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Pemenuhan Hak Anak dalam :
 - (a) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak;
 - (b) melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
 - (c) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - (d) membina dan fasilitasi pemenuhan hak anak;
 - (e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan;
 - (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Bidang Perlindungan Khusus Anak dalam :
 - (a) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak;
 - (b) melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - (c) melaksanakan penyediaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - (d) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perlindungan khusus anak;
 - (e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- (3) Sub Koordinator Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dalam :
- (a) menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi anak;
 - (b) mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data gender dan anak;
 - (c) menyediakan data gender dan anak;
 - (d) menyajikan dan memanfaatkan data gender dan anak;
 - (e) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi data gender dan anak;
 - (f) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - (g) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta data dan informasi keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta data dan informasi keluarga;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera membawahkan:

1) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta data dan informasi keluarga. Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

- a. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk;
- b. Kelompok Substansi Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Kelompok Substansi Data dan Informasi Keluarga.

Masing-masing kelompok substansi dipimpin oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur :

- a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;
- b. Sub Koordinator Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- c. Sub Koordinator Data dan Informasi Keluarga.

(1) Sub Koordinator Pengendalian Penduduk mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Pengendalian Penduduk dalam :

- (a) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;

- (b) melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - (c) melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - (d) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengendalian penduduk;
 - (e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sub Koordinator Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dalam:
- (a) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - (b) melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - (c) melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - (d) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - (e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - (f) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Koordinator Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Data dan Informasi Keluarga dalam:
- (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan data dan informasi keluarga;

- (b) melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pemanfaatan hasil pemutakhiran data keluarga;
- (c) melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pemanfaatan hasil pemutakhiran data keluarga;
- (d) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta pemutakhiran data keluarga.
- (e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
- (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, jaminan pelayanan keluarga berencana serta pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
- b. penyusunan kebijakan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keluarga berencana;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, jaminan pelayanan

- keluarga berencana dan pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana serta Pendayagunaan Pengelola Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:

- a. Kelompok Substansi Advokasi dan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
- b. Kelompok Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- c. Kelompok Substansi Pendayagunaan Pengelola Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat.

Masing-masing kelompok substansi dipimpin dan dikoordinasikan oleh Seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur :

- a. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
- b. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- c. Sub Koordinator Pendayagunaan Pengelola Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat.

- (1) Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mempunyai tugas memimpin dan

mengoordinasikan kelompok substansi Bidang Advokasi dan KIE dalam :

- (a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi;
- (b) melaksanakan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (c) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
- (d) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
- (e) melaksanakan penyediaan dan distribusi sarana komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
- (f) mengelola dan mengendalikan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
- (g) mengelola dan mengendalikan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
- (h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
- (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub Koordinator Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dalam:

- (a) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan keluarga berencana;

- (b) melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
 - (c) melaksanakan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
 - (d) melaksanakan penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang.
 - (e) menyusun rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana.
 - (f) melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
 - (g) melaksanakan dukungan operasional pelayanan keluarga berencana.
 - (h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - (i) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Koordinator Pendayagunaan Pengelola Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang Pendayagunaan Pengelolaan Keluarga Berencana dalam :
- (a) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat;
 - (b) melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
 - (c) melaksanakan pembinaan institusi masyarakat pedesaan/kelurahan (IMP) dan penggerakan kader institusi msyarakat pedesaan/kelurahan (IMP);
 - (d) melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan

- pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- (e) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- (f) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DP3AP2KB

Unit Pelaksana Teknis (UPT) DP3AP2KB mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPT DP3AP2KB mempunyai fungsi :

- a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
- b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan UPT;
- c. penjaminan kualitas pelayanan dalam UPT;
- d. penyediaan tata tertib penyelenggaraan UPT;
- e. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
- f. pemantauan dan evaluasi penyelenggara UPT.

(1) Kepala UPT

Kepala UPT mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas dan fungsi UPT

(2) Subbagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan ketatausahaan UPT, dipimpin oleh seorang kepala Subbagian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- (a) penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- (b) pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- (c) penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- (d) pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- (e) pelaksanaan kerumahtanggaan; dan

- (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

C. Struktur Organisasi

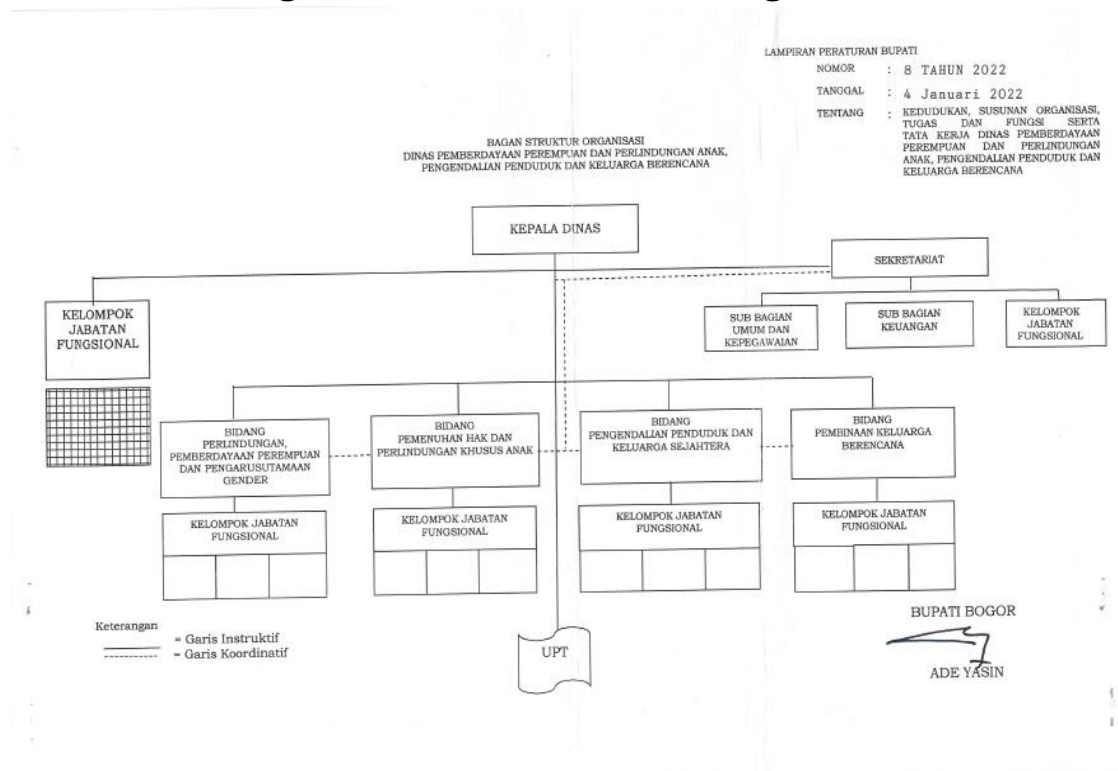
Susunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan;
 - b. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Sub Koordinator Data dan Informasi Gender dan Anak;
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;

- b. Kelompok Substansi Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - c. Sub Koordinator Data dan Informasi Keluarga
6. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Sub Koordinator Advokasi dan KIE;
 - b. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan KB; dan
 - c. Sub Koordinator Pendayagunaan Pengelola KB dan Institusi Masyarakat
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.2. Sumber Daya DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan program dan kegiatan didukung oleh 102 orang pegawai, yang terdiridari 14 orang pejabat struktural (1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III, 8 orang pejabat eselon IV, 9 orang pejabat fungsional, 58 orang pelaksana, 18 orang tenaga rekrutmen, 13 orang tenaga kebersihan dan 10 orang tenaga keamanan. Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1 JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT DAN JABATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

GOLONGAN	ESELON						PELAKSANA	FUNGSIONAL	TENAGA REKRUTMEN	TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TOTAL
	I	II	III.a	III.b	IV.a	IV.b						
Golongan : IV / d												
Golongan : IV / c		1										1
Golongan : IV / b												
Golongan : IV / a				3	1			3				7
Jumlah Golongan IV												8
Golongan : III / d					1		6	3				10
Golongan : III / c							4					4
Golongan : III / b							2					2
Golongan : III / a							13					13
Jumlah Golongan III												29
Golongan : II / d							2					2
Golongan : II / c								3				3
Golongan : II / b												
Golongan : II / a							4					4
Jumlah Golongan II												9
Golongan : I / d												
Golongan : I / c												
Golongan : I / b												
Golongan : I / a												
Jumlah Golongan I												
Jumlah ASN		1		3	2		31	9				46
S1							14					
D3							1					
SLTA							1			10	7	
SLTP							1					
SD												
TOTAL NON ASN							17			10	7	34
TOTAL							48	9		10	7	80

TABEL 2.2 JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT DAN JABATAN
UPT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

GOLONGAN	ESELON						PELAK-SANA	FUNGSI-ONAL	TENAGA REKRUT-MEN	TENAGA KEBERSI-HAN	TENAGA KEAMA-NAN	TOTAL
	I	II	III.a	III.b	IV.a	IV.b						
Golongan : IV / d												
Golongan : IV / c												
Golongan : IV / b												
Golongan : IV / a												
Jumlah Golongan IV												
Golongan : III / d					2	1						3
Golongan : III / c					1	2	1					4
Golongan : III / b												
Golongan : III / a							6					6
Jumlah Golongan III												13
Golongan : II / d												
Golongan : II / c												
Golongan : II / b												
Golongan : II / a							2					2
Jumlah Golongan II												2
Golongan : I / d												
Golongan : I / c												
Golongan : I / b												
Golongan : I / a												
Jumlah Golongan I												
Jumlah PNS/PPPK	0	0	0	0	4	3	9	0	0	0	0	15
S1							1					1
D3												
SLTA										3	3	6
SLTP												
SD												
TOTALN NON ASN							1			3	3	7
TOTAL UPT					4	3	10			3	3	22
TOTAL DP3AP2KB												102

TABEL 2.3 JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA MENURUT PANGKAT, JABATAN, DAN JENIS KELAMIN

NO	PANGKAT/GOL	JUMLAH	
		Perempuan	Laki-laki
1	Pembina Utama Muda IV/c	1	
2	Pembina IV/a	5	2
3	Penata Tingkat I III/d	10	4
4	Penata III/c	7	1
5	Penata Muda Tingkat I III/b	1	
6	Penata Muda III/a	6	6
7	Pengatur Tingkat I II/d	1	1
8	Pengatur II/c	2	1
9	IX	6	1
10	V	2	5
JUMLAH		41	21

Berdasarkan jumlah pegawai yang bekerja, DP3AP2KB membutuhkan penambahan pegawai untuk penguatan kapasitas kinerja pegawai sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada DP3AP2KB menjadi lebih optimal dalam memenuhi tujuan dan sasaran dinas.

Bidang Sekretariat memiliki 13 orang pegawai, sedangkan kebutuhan pegawai sebesar 24 orang (kurang 11 orang pegawai). Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender memiliki 9 orang pegawai, sedangkan kebutuhan pegawai sebesar 18 orang (kurang 9 orang pegawai). Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak memiliki 8 orang pegawai, sedangkan kebutuhan pegawai sebesar 16 orang (kurang 8 orang pegawai). Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera memiliki 8 orang pegawai, sedangkan kebutuhan pegawai sebesar 17 orang (kurang 9 orang pegawai). Bidang Pembinaan Keluarga Berencana memiliki 7 orang pegawai, sedangkan kebutuhan pegawai sebesar 17 orang (kurang 10 orang pegawai).

UPT PPA Wilayah Tengah memiliki 6 orang pegawai, sedangkan kebutuhan pegawai sebesar 11 orang (kurang 5 orang pegawai). UPT PPA Wilayah Barat memiliki 5 orang pegawai, sedangkan kebutuhan pegawai sebesar 10 orang (kurang 5 orang pegawai). UPT PPA Wilayah Timur memiliki 4 orang pegawai, sedangkan kebutuhan pegawai sebesar 10 orang (kurang 6 orang pegawai). Rincian jabatan yang dibutuhkan terdapat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

**TABEL 2.4 JUMLAH DAN KEBUTUHAN PEGAWAI MENURUT BIDANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI			KEBUTUHAN		KETERANGAN
		IDEAL	EKSISTING	+/-	JABATAN	JUMLAH	
	DINAS	93	46	-47			
1	KEPALA DINAS	1	1				
2	SEKRETARIAT	24	13	-11	Sekretaris Dinas	1	
					Perencana Ahli Pertama	1	
					Penelaah Teknis Kebijakan	4	
					Pengelola Data dan Informasi	4	
					Pengadministrasi Perkantoran	1	
3	BIDANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSTAMAAN GENDER	18	9	-9	Kepala Bidang	1	
					Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	
					Pengelola Data dan Informasi	5	
4	BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	16	8	-8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	
					Penelaah Teknis Kebijakan	2	
					Penata Layanan Operasional	2	
					Pengelola Data dan Informasi	1	
					Pengadministrasi Perkantoran	1	
5	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA	17	8	-9	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	1	
					Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	1	
					Penelaah Teknis Kebijakan	3	
					Penata Layanan Operasional	2	
					Pengelola Data dan Informasi	2	
6	BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	17	7	-10	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	1	
					Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	1	
					Penelaah Teknis Kebijakan	2	

NO	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI			KEBUTUHAN		KETERANGAN
		IDEAL	EKSISTING	+/-	JABATAN	JUMLAH	
					Penata Layanan Operasional	1	
					Pengelola Data dan Informasi	5	
	UPT	31	15	-16			
1	UPT PPA WILAYAH TENGAH	11	6	-5	Kepala UPT	1	kelebihan 1 orang jabatan Pegawai Sub Bagian TU
					Pekerja Sosial Ahli Pertama	2	
					Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	
2	UPT PPA WILAYAH BARAT	10	5	-5	Pekerja Sosial Ahli Pertama	2	
					Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	
3	UPT PPA WILAYAH TIMUR	10	4	-6	Pekerja Sosial Ahli Pertama	2	
					Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	
	TOTAL	124	61	-63			

Kelancaran seluruh kegiatan DP3AP2KB didukung oleh sarana dan prasarana kerja, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan aman, efisien, dan berkelanjutan. DP3AP2KB memiliki 1 unit bangunan Dinas, 1 Rumah Merah Putih, 18 Balai Penyuluhan KB, Taman Edukatif, dan Rumah Dinas. Terdapat 27 unit kendaraan roda 2 dan 18 kendaraan roda 4 pada dinas, 234 unit kendaraan roda 2 pada tenaga lapangan Penyuluh KB di Balai Penyuluh KB. 18 Balai Penyuluhan KB sebagai berikut:

1. Balai Penyuluh KB Gunung Sindur
2. Balai Penyuluh KB Tajur Halang
3. Balai Penyuluh KB Bojong Gede
4. Balai Penyuluh KB Rumpin
5. Balai Penyuluh KB Kelapa Nunggal
6. Balai Penyuluh KB Cileungsi
7. Balai Penyuluh KB Ciawi

8. Balai Penyuluh KB Parung
9. Balai Penyuluh KB Citereup
10. Balai Penyuluh KB Jonggol
11. Balai Penyuluh KB Leuwisadeng
12. Balai Penyuluh KB Ciampea
13. Balai Penyuluh KB Jasinga
14. Balai Penyuluh KB leuwiliang
15. Balai Penyuluh KB Kemang
16. Balai Penyuluh KB Ciseeng
17. Balai Penyuluh KB Tamansari
18. Balai Penyuluh KB Cibinong

2.1.3. Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Bogor

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) untuk urusan wajib Non Pelayanan Dasar dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

a. Indikator Kinerja Utama

- Indikator Kinerja Utama yang tercapai:

1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR) dengan Target 61,79%, Realisasi sebesar 66,69%, atau dengan capaian 107,92%

- Indikator Kinerja Utama yang terlampaui :

1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR) dengan Target 61,79%, Realisasi sebesar 66,69%, atau dengan capaian 107,92%
2. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) dengan Target 11,00%, Realisasi sebesar 8,38%, atau dengan capaian 131,26%

Indikator tersebut terlampaui dan tercapai karena Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan

Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)

- Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Target 90,77 poin, Realisasi sebesar 90,17 poin, atau dengan capaian 99,34 %
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Target 59,35 poin, Realisasi sebesar 56,99 poin, atau dengan capaian 96,02 %

Indikator tersebut tidak tercapai karena belum Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan, Meningkatnya Kekerasan terhadap Perempuan, dan Kurangnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan anak

b. Indikator Kinerja Kunci

- Indikator Kinerja Kunci yang tercapai :

1. Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dengan Target 34,15%, Realisasi sebesar 34,15%, atau dengan capaian 100%
2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan didampingi dengan Target 100%, Realisasi sebesar 100%, atau dengan capaian 100%
3. Persentase Kebijakan yang disinergikan dengan Target 33,33%, Realisasi sebesar 33,33%, atau dengan capaian 100%
4. Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan Target 71,25%, Realisasi sebesar 71,25%, atau dengan capaian 100%

- Indikator Kinerja Kunci yang terlampaui:

1. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan Target 9,67%, Realisasi sebesar 9,79%, atau dengan capaian 101,24%
2. Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang Ber- KB dengan Target 77,54%, Realisasi sebesar 84,05%, atau dengan capaian 108,40%

Indikator tersebut terlampaui dan tercapai karena Terbinanya MOTEKAR, GUGUS PPA, SATGAS PPA, PUSPAGA, PATBM, Forum Anak, P2TP2A, Forum PUSPAGA, LSM Perempuan dan Anak di masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Terlaksananya kerjasama dengan Perangkat Daerah, Pemerhaati/Lembaga masyarakat dalam pelaksanaan Kecamatan Layak Anak, Terlaksananya penyuluhan dan penggerakan Kepada Keluarga dan Pasangan Usia Subur, Terbinanya Tenaga Penggerak Desa (TPD), Penyuluh KB (PKB) Kader Pos KB dan Sub Pos KB Desa dan kelompok Tribina, dan Terjalinnnya kerjasama program Bangga Kencana dengan OPD dan Faskes.

- Indikator Kinerja Kunci yang tidak tercapai :

1. Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada Belanja APBD dengan Target 35,27%, Realisasi sebesar 35,10%, atau dengan capaian 99,52%
2. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Target rasio 2,20 , Realisasi sebesar 4,37, atau dengan capaian 50,34%
3. Tingkat pemenuhan ekonomi keluarga yang dikontribusi oleh perempuan dengan Target 3,68%, Realisasi sebesar 3,65%, atau dengan capaian 99,18%
4. Kategori Kabupaten Layak Anak dengan Target 710 Poin, Realisasi sebesar 639,91 poin, atau dengan capaian 90,13%

Indikator tersebut tidak tercapai karena Terbatasnya Jumlah SDM di DP3AP2KB, Terbatasnya Jumlah TPD, Kurangnya ruang bermain, berolahraga bagian anak, Kurangnya kesadaran masyarakat dengan program Bangga Kencana, Masih terbatasnya pemahaman masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Adapun tabel **Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 dan 2.5** sebagai berikut:

TABEL 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DP3AP2KB
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2024

URUSAN/UNSUR : NON PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
	IKU																	
	Tahun 2020																	
1	Meningkatnya Peran Wanita dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	1,23					1,25					101,63				
		Persentase partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	%	27,80					18,26					65,68				
		Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	12,00					10,00					83,33				
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	80,00					100,00					125,00				

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	Menurunnya laju Pertumbuhan Penduduk Alami	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa	%	100,00					100,00					100,00				
		Persentase pemakaian kontrasepsi KB/Contraception Prevelance Rate (CPR)	%	70,69					73,76					104,34				
		Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (DO)	%	12,05					11,83					98,17				
		Cakupan Kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS)yang ingin Ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	%	16,49					14,01					84,98				
	Tahun 2021-2023																	
	TUJUAN																	
1	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan	Partisipasi Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%		7,82	7,28	6,81			23,06	8,43	7,92			294,84	115,82	116,30	
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Alami	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Point		2,44	2,42	2,40			2,12	2,17	2,17			114,96	89,58	110,60	

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	SASARAN																	
1	Meningkatnya peran perempuan dalam kehidupan sosial dan Ekonomi	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%		27,85	27,90	27,95			27,91	28,76	30,33			100,22	103,09	108,52	
2	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%		72,50	85,00	100,00			72,50	100,00	100,00			100,00	117,65	100,00	
3	Meningkatnya Kepesertaan Pasangan Usia Subur Untuk Ber-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi KB/Contraception Prevalance Rate (CPR)	%		70,75	70,82	61,74			74,25	61,70	66,69			104,95	87,13	108,02	
	Tahun 2024																	
	TUJUAN																	
1	Meningkatnya Peran Perempuan dan perlindungan anak dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point					90,77					90,17					99,34
2	Meningkatnya Kepesertaan Pasangan Usia Subur Untuk Ber-KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR)	%					61,79					66,69					107,92
	SASARAN																	
1	Meningkatnya peran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point					59,35					56,99					96,02

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber KB	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%					11,00					8,38					131,26
	IKK																	
	Tahun 2020																	
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Kepala Keluarga Perempuan Yang Memperoleh Keterampilan	%	5,37					0,87					82,75				
		Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah Gender	%	32,05					34,72									
		Rasio KDRT	%	0,00					0,00									
2	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kecamatan	%	13,00					11,54					127,71				
		Perentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Anak Terpilah	%	20,00					33,33									
3	Program Pengelolaan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak	%	100,00					100,00					100,00				

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	Program Penyuluhan dan Advokasi Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	83,09					84,51					100,85				
		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100,00					100,00									
5	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur	%	11,08					11,13					107,06				
		Cakupan Pus Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB	%	77,97					83,60									
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB	%	76,07					79,00									
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB	%	76,14					84,16									

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%	77,14					87,31									
		Persentase Kelompok PIK Remaja yang terbentuk	%	70,00					75,00									
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	100,00					100,00					100,00				
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk pegawai	%	100,00					100,00									
		Persentase Pelayanan Kepegawaian		100,00					100,00									
		Persentase Perencanaan sesuai Target	%	100,00					100,00									
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target	%	100,00					100,00									

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Tahun 2021-2024																	
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsive gender (ARG) pada Belanja Daerah	%		30,00	32,50	35,00			30,27	33,55	35,00			100,90	103,23	100,00	
		Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada Belanja APBD	%					35,27					35,10					99,52
2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio		0,0026	0,0025	0,0023	2,20		0,0025	0,0059	0,0059	4,37		103,85	42,41	38,98	50,31
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Tingkat pemenuhan ekonomi keluarga yang berkontribusi oleh perempuan	%		2,53	2,78	3,06	3,68		3,61	3,24	3,56	3,65		142,69	116,55	116,34	99,18
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak	%		55,56	83,95	100,00	34,15		58,33	83,95	100,00	34,15		104,99	100,00	100,00	100,00

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat partisipasi lembaga pemenuhan hak anak	%		30,00	60,00	100,00			30,00	60,00	100,00			100,00	100,00	100,00	
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori					Nindya					Madya					90,13
			Poin					710,00					639,91					
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan didampingi	%		0,000034	0,00006	0,00007	100,00		0,00005	0,00996	0,00011	100,00		137,15	163,35	157,14	100,00
7	Progra Pengendalian Penduduk	Persentase Kebijakan yang disinergikan	%		25,00	75,00	100,00	33,33		25,00	75,00	100,00	33,33		100,00	100,00	100,00	100,00
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	%		16,39	16,30	24,54			13,62	24,58	13,04			116,90	47,61	146,86	
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%					9,67					9,79					101,24
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang Ber- KB	%		77,08	77,20	77,37	77,54		83,52	95,79	93,35	84,05		108,35	124,08	120,65	108,40
		Persentase Terbentuknya kelompok PIK Remaja	%		85,00	92,50	100,00			90,00	95,00	107,43			105,88	102,70	107,43	

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%		100,00	100,00	100,00			100,00	99,91	100,00			108,35	99,91	100,00	
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat					BB					BB					BB
			%					71,25					71,25					100,00

Pada tahun 2020, dari 6 Program, 57 kegiatan DP3AP2KB Terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 20.815.880.060 dari target anggaran sebesar Rp. 21.334.059.186, dengan persentase capaian anggaran sebesar 97,57 %. Realisasi anggaran dapat terlihat pada pelaksanaan masing masing program, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Realisasi anggaran program Rp. 2.150.623.800 dari total anggaran Rp. 2.197.360.500 dengan capaian 97,87%.
2. Program Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.196.701.600 (53,16%) dari total anggaran Rp. 1.266.324.664 dengan capaian 94,50%.
3. Program Pengelolaan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 446.417.250 dari total anggaran Rp. 450.247.360 dengan capaian 99,15%
4. Program Penyuluhan dan Advokasi Pengendalian Penduduk. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 7.201.974.045 dari total anggaran Rp. 7.368.843.000 capaian 97,74%
5. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 3181647850 dari total anggaran Rp. 3.199.469.560 dengan capaian 99,44%.
6. Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 6.638.515.515 dari total anggaran Rp. 6.851.814.102 dengan capaian 96,89%

Anggaran DP3AP2KB tahun 2021 dari 10 Program, 26 kegiatan dan 84 Sub Kegiatan DP3AP2KB Terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 32.282.831.337 dari target anggaran sebesar Rp. 32.844.515.161, dengan persentase capaian anggaran sebesar 98.29%. Realisasi anggaran dapat terlihat pada pelaksanaan masing masing program, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran program sebesar

Rp. 15.751.831.690 dari total anggaran Rp. 16.065.303.916 dengan capaian 98,05%.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.273.274.645 dari total anggaran Rp. 1.325.288.574 dengan capaian 96,08%.
3. Program Perlindungan Perempuan. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 599.350.386 dari total anggaran Rp. 601.977.154 dengan capaian 99,56%
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 220.548.125 dari total anggaran Rp. 222.112.500 dengan capaian 99,30%
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 403.820.037 dari total anggaran Rp. 406.074.618 dengan capaian 99,44%.
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 231.425.920 dari total anggaran Rp. 233.297.954 dengan capaian 99,20%
7. Program Perlindungan Khusus Anak. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.135.911.562 dari total anggaran Rp. 1.153.491.236 dengan capaian 98,48%.
8. Program Pengendalian Penduduk. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 283.511.774 dari total anggaran Rp. 286.061.774 dengan realisasi fisik 99,11%.
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 10.523.820.624 dari total anggaran Rp. 10.650.621.561 capaian 98,81%.
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.859.336.574 dari total anggaran Rp. 1.900.285.874 dengan capaian 97,85%

Anggaran DP3AP2KB tahun 2022 dari 10 Program, 27 kegiatan dan 93 Sub Kegiatan DP3AP2KB Terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 55.504.222.559 dari target anggaran sebesar Rp. 64.067.939.501, dengan persentase capaian anggaran sebesar 86,63%. Realisasi anggaran dapat terlihat pada pelaksanaan masing masing program, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran program sebesar Rp. 13.906.829.328 dari total anggaran Rp. 14.241.749.969 dengan capaian 97,64%.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 300.073.866 dari total anggaran Rp. 301.287.254 dengan capaian 99,60%.
3. Program Perlindungan Perempuan. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 968.223.469 dari total anggaran Rp. 995.401.417 dengan capaian 97,27%
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 222.577.120 dari total anggaran Rp. 224.208.920 dengan capaian 99,27%
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 278.444.989 dari total anggaran Rp. 285.540.519 dengan capaian 97,52%
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 344.408.830 dari total anggaran Rp. 345.201.710 dengan realisasi fisik 99,97%
7. Program Perlindungan Khusus Anak. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.457.562.856 dari total anggaran Rp. 1.471.163.197 dengan capaian 99,08%
8. Program Pengendalian Penduduk. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 545.913.090 dari total anggaran Rp. 572.249.766 dengan realisasi fisik 95,40%
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 15.410.340.021 dari total anggaran Rp. 16.946.612.895 capaian 90,93%

10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 22.069.848.990 dari total anggaran Rp. 28.684.521.113 dengan capaian 76,94%

Anggaran DP3AP2KB tahun 2023 dari 10 Program, 27 kegiatan dan 93 Sub Kegiatan DP3AP2KB Terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 65.229.610.126 dari target anggaran sebesar Rp. 67.007.691.189, dengan persentase capaian anggaran sebesar 97,35%. Realisasi anggaran dapat terlihat pada pelaksanaan masing masing program, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran program sebesar Rp. 14.556.248.688 dari total anggaran Rp. 15.367.740.374 dengan capaian 94,72%.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.023.122.226 dari total anggaran Rp. 1.029.122.072 dengan capaian 99,42%.
3. Program Perlindungan Perempuan. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 689.472.095 dari total anggaran Rp. 717.844.339 dengan capaian 96,05%
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 2.275.135.850 dari total anggaran Rp. 2.838.332.771 dengan capaian 80,16%
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 221.725.308 dari total anggaran Rp. 258.826.808 dengan capaian 85,67%
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 986.475.810 dari total anggaran Rp. 1.006.974.995 dengan realisasi fisik 97,96%
7. Program Perlindungan Khusus Anak. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 2.360.976.083 dari total anggaran Rp. 2.452.113.311 dengan capaian 96,28%
8. Program Pengendalian Penduduk. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.072.450.518 dari total anggaran Rp. 1.127.310.600 dengan realisasi fisik 95,13%

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 13.716.996.930 dari total anggaran Rp. 13.925.908.847 capaian 98,50%
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 28.240.545.552 dari total anggaran Rp. 28.283.517.072 dengan capaian 99,85%

Anggaran DP3AP2KB tahun 2024 dari 10 Program, 29 kegiatan dan 84 Sub Kegiatan DP3AP2KB Terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 83.705.423.616 dari target anggaran sebesar Rp. 84.918.411.193, dengan persentase capaian anggaran sebesar 98,57 %. Realisasi anggaran dapat terlihat pada pelaksanaan masing masing program, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran program sebesar Rp. 37.887.939.922 dari total anggaran Rp. 38.340.265.800 dengan capaian 98,82%.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 292.721.078 dari total anggaran Rp. 301.918.421 dengan capaian 96,95%.
3. Program Perlindungan Perempuan. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 625.421.259 dari total anggaran Rp. 636.923.012 dengan capaian 98,19%
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 286.306.849 dari total anggaran Rp. 289.573.215 dengan capaian 98,87%
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 157.961.199 dari total anggaran Rp. 160.841.559 dengan capaian 98,21%
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 370.161.457 dari total anggaran Rp. 381.479.870 dengan realisasi fisik 97,05%
7. Program Perlindungan Khusus Anak. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.744.790.790 dari total anggaran Rp. 1.771.173.663 dengan capaian 98,51%

- 8. Program Pengendalian Penduduk. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 941.918.117 dari total anggaran Rp. 971.766.476 dengan realisasi fisik 96,93 %
- 9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 13.616.927.497 dari total anggaran Rp. 14.258.047.786 capaian 95,50%
- 10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 27.781.275.448 dari total anggaran Rp. 27.806.496.391 dengan capaian 99,91%

Gambaran rincian target, realisasi, dan capaian anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pada DP3AP2KB Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

TABEL 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DP3AP2KB KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
TAHUN 2020	21.334.059.186					20.815.880.060					97,57						
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	2.197.360.500					2.150.623.800					97,87						
Pengelolaan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	55.833.000					54.298.000					97,25						
Penyelenggaran Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	76.279.500					75.852.500					99,44						
Pelatihan pelaksanaan PUG dan PPRG	1.453.817.000					1.416.478.550					97,43						
Pengelolaan Data dan Informasi Gender	412.176.000					409.097.000					99,25						
Pencegahan dan Pengelolaan Kekerasan terhadap Perempuan	199.255.000					194.897.750					97,81						
PROGRAM PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.266.324.664					1.196.701.600					94,50						
Pembentukan dan Pembinaan Kecamatan Ramah Anak	460.395.000					456.102.000					99,07						
Jumbara Anak																	
Pengelolaan Data dan Informasi Anak	93.398.000					92.163.000					98,68						
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	682.394.664					618.374.600					90,62						
Penguatan Komitmen Perlindungan Khusus Anak	30.137.000					30.062.000					99,75						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	450.247.360					446.417.250					99,15						
Pengelolaan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPT PPA I Ciawi	89.201.000					88.551.000					99,27						
Pengelolaan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPT PPA II Jonggol	94.009.360					93.854.000					99,83						
Pengelolaan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPT PPA III Ciseeng	73.356.000					73.352.000					99,99						
Pengelolaan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPT PPA IV Tamansari	119.932.000					118.882.000					99,12						
Pengelolaan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPT PPA V Leuwisadeng	73.749.000					71.778.250					97,33						
PROGRAM PENYULUHAN DAN ADVOKASI PENGENDALIAN PENDUDUK	7.368.843.000					7.201.974.045					97,74						
Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui Kampung KB	212.078.000					191.109.000					90,11						
Penguatan komitmen dalam pengendalian penduduk	19.450.000					18.450.000					94,86						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Penyuluhan Pengendalian Penduduk melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	202.326.000					201.752.000					99,72						
Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga (MDK)	322.856.000					319.419.405					98,94						
Perencanaan Pengendalian Penduduk Melalui Pola Kemitraan	105.133.000					103.213.140					98,17						
Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK)	750.000.000					689.800.000					91,97						
Pengadaan Media/Alat Pengolah Data Personal Computer (DAK)	51.300.000					51.090.000					99,59						
Pengadaan Media/Alat Pengolah Data Note Book/Laptop (DAK)	13.500.000					13.250.000					98,15						
Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK)	164.000.000					115.230.500					70,26						
Biaya Oprasional Integrasi Program KKBPK (DAK)	2.716.200.000					2.715.260.000					99,97						
Operasional Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD DAN SUB PPKBD) (DAK)	2.610.000.000					2.610.000.000					100,00						
Dukungan Pembuatan Media KIE (DAK)	202.000.000					173.400.000					85,84						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	3.199.469.560					3.181.647.850					99,44						
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	809.288.000					806.404.000					99,64						
Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	525.709.600					521.687.700					99,23						
Pembentukan dan pembinaan kelompok UPPKS melalui Usaha Ekonomis Produktif (UEP)	273.411.000					269.617.950					98,61						
Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja	358.499.960					355.622.200					99,20						
Pengadaan Sarana BKB KIT (DAK)	115.311.000					113.300.000					98,26						
Pengadaan Sarana BKL KIT (DAK)	125.400.000					125.202.000					99,84						
Pengadaan Sarana Genre KIT (DAK)	168.000.000					166.134.000					98,89						
Operasional Kelompok Tribina Berbasis Ketahanan Keluarga (DAK)	608.800.000					608.640.000					99,97						
Pola Pengasuhan 1000 HPK Dalam Pencegahan Stunting (DAK)	215.050.000					215.040.000					100,00						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	6.851.814.102					6.638.515.515					96,89						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.480.000					122.378.643					88,37						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000					22.000.000					100,00						
Penyediaan Makanan dan Minuman	92.722.000					92.715.500					99,99						
Pengelolaan Keamanan Kantor	231.652.000					216.145.000					93,31						
Pengelolaan Kebersihan Kantor	339.815.000					322.529.000					94,91						
Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	43.000.000					39.126.400					90,99						
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	536.947.602					533.605.000					99,38						
Pengadaan Perlengkapan Kantor	492.654.000					478.694.830					97,17						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	55.000.000					53.181.000					96,69						
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	158.850.000					156.650.000					98,62						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	78.000.000					77.800.000					99,74						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	11.018.000					11.018.000					100,00						
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	305.680.500					305.667.542					100,00						
Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	9.900.000					9.900.000					100,00						
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2.407.733.000					2.404.008.000					99,85						

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	7.000.000					7.000.000					100,00						
Penyusunan Pelaporan Keuangan	19.256.000					17.459.000					90,67						
Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	164.264.000					161.568.100					98,36						
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6.033.000					6.032.750					100,00						
Penyusunan Perencanaan Anggaran	68.841.000					68.353.750					99,29						
Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	102.515.000					101.844.500					99,35						
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	39.307.000					39.297.000					99,97						
Publikasi Kinerja SKPD	45.500.000					45.118.000					99,16						
Biaya Operasional Balai Penyuluhan (DAK)	1.063.350.000					1.024.413.500					96,34						
Biaya Operasional Distribusi Alokasi (DAK)	308.736.000					221.475.000					71,74						
Dukungan Manajemen BOKB (DAK)	103.560.000					100.535.000					97,08						
TAHUN 2021-2024																	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak																	

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1.325.288.574	301.289.995	1.029.122.072	301.918.421	-	1.273.274.645	300.073.866	1.023.122.226	292.721.078		96,08	99,60	99,42	96,95		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota		506.228.574	238.912.785	204.309.807	107.626.233	-	455.447.570	237.696.766	202.639.416	105.932.934		89,97	99,49	99,18	98,43		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota		383.042.874	128.653.575	92.162.774	26.833.892		333.014.320	127.876.816	92.153.916	26.152.639		86,94	99,40	99,99	97,46		
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG		123.185.700	110.259.210	112.147.033	80.792.341		122.433.250	109.819.950	110.485.500	79.780.295		99,39	99,60	98,52	98,75		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota					107.399.177					100.860.860					93,91		
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi					107.399.177					100.860.860							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		819.060.000	62.377.210	824.812.265	86.893.011	-	817.827.075	62.377.100	820.482.810	85.927.284		99,85	100,00	99,48	98,89		
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		819.060.000	62.377.210	824.812.265	86.893.011		817.827.075	62.377.100	820.482.810	85.927.284		99,85	100,00	99,48	98,89		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		601.977.154	995.401.417	717.844.339	636.923.012	-	599.350.386	968.223.469	689.472.095	625.421.259		99,56	97,27	96,05	98,19		
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		314.050.654	613.845.467	90.942.342	97.070.369	-	311.514.686	600.757.404	76.498.125	94.960.789		99,19	97,87	84,12	97,83		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		14.482.350	149.481.014	90.942.342	97.070.369		14.322.350	141.326.400	76.498.125	94.960.789		98,90	94,54	84,12	97,83		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		299.568.304	464.364.453				297.192.336	459.431.004				99,21	98,94				
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		287.926.500	381.555.950	570.760.696	421.692.258	-	287.835.700	367.466.065	556.955.070	414.097.400		99,97	96,31	97,58	98,20		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				221.428.500					212.252.877					95,86			
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		65.000.000	49.992.160	60.461.491	76.230.675		65.000.000	49.992.160	60.106.489	74.598.500		100,00	100,00	99,41	97,86		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		63.235.000	43.792.455	41.824.951	79.683.400		63.235.000	43.792.455	40.348.352	79.489.000		100,00	100,00	96,47	99,76		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		57.500.000	50.140.845	53.299.005	53.464.483		57.500.000	50.140.845	52.763.085	49.451.200		100,00	100,00	98,99	92,49		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		59.420.000	53.187.455	54.613.207	75.632.500		59.360.000	53.187.455	54.126.933	75.111.965		99,90	100,00	99,11	99,31		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		42.771.500	53.488.195	20.418.542	36.681.200		42.740.700	53.168.150	19.637.334	36.161.735		99,93	99,40	96,17	98,58		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			27.061.640	25.470.000	21.000.000			27.061.640	25.470.000	21.000.000			100,00	100,00	100,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			26.331.640	25.505.000	19.000.000			22.561.800	25.050.000	19.000.000			85,68	98,22	100,00		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			21.491.640	20.930.000	19.000.000			21.491.640	20.930.000	19.000.000			100,00	100,00	100,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			21.738.280	21.080.000	20.000.000			21.738.280	21.080.000	19.985.000			100,00	100,00	99,93		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			34.331.640	25.730.000	21.000.000			24.331.640	25.190.000	20.300.000			70,87	97,90	96,67		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				56.141.301	118.160.385				56.018.900	116.363.070				99,78	98,48		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota				56.141.301	118.160.385				56.018.900	116.363.070				99,78	98,48		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		222.112.500	224.208.920	2.838.332.771	289.573.215	-	220.548.125	222.577.120	2.275.135.850	286.306.849		99,30	99,27	80,16	98,87		
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		172.112.500	222.948.900	2.810.495.974	247.711.874	-	170.548.125	221.317.520	2.249.645.650	244.494.849		99,09	99,27	80,04	98,70		
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		172.112.500	222.948.900	2.810.495.974	247.711.874		170.548.125	221.317.520	2.249.645.650	244.494.849		99,09	99,27	80,04	98,70		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000	1.260.020	27.836.797	41.861.341	-	50.000.000	1.259.600	25.490.200	41.812.000		100,00	99,97	91,57	99,88		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000	1.260.020	27.836.797	41.861.341		50.000.000	1.259.600	25.490.200	41.812.000		100,00	99,97	91,57	99,88		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		406.074.618	285.540.519	258.826.808	160.841.559	-	403.820.037	278.444.989	221.725.308	157.961.199		99,44	97,52	85,67	98,21		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ kota		406.074.618	285.540.519	258.826.808	160.841.559	-	403.820.037	278.444.989	221.725.308	157.961.199		99,44	97,52	85,67	98,21		
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		130.931.618	137.672.419	119.242.608	117.564.984		130.171.662	133.525.219	109.776.608	115.148.099		99,42	96,99	92,06	97,94		
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		275.143.000	147.868.100	139.584.200	43.276.575		273.648.375	144.919.770	111.948.700	42.813.100		99,46	98,01	80,20	98,93		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		233.297.954	345.201.710	1.006.974.995	381.404.870	-	231.425.920	344.408.830	986.475.810	370.161.457		99,20	99,77	97,96	97,05		
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota		156.033.504	148.906.013	681.893.376	148.106.609	-	154.535.370	148.526.013	664.728.701	145.381.969		99,04	99,74	97,48	98,16		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		74.773.368	73.585.598	570.025.295	69.467.200		73.733.312	73.265.598	554.098.320	68.501.790		98,61	99,57	97,21	98,61		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		81.260.136	75.320.415	111.868.081	78.639.409		80.802.058	75.260.415	110.630.381	76.880.179		99,44	99,92	98,89	97,76		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		77.264.450	196.295.697	325.081.619	233.298.261	-	76.890.550	195.882.817	321.747.109	224.779.488		99,52	99,79	98,97	96,35		
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		31.411.600	104.679.579	189.121.712	80.140.650		31.341.600	104.348.179	187.195.475	78.159.895		99,78	99,68	98,98	97,53		
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		45.852.850	74.498.648	83.338.883	24.607.225		45.548.950	74.428.648	82.246.208	23.384.095		99,34	99,91	98,69	95,03		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PendampinganPeningkatan Kualitas HidupAnak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA I Ciawi)			3.481.800	5.499.165	19.036.000			3.481.800	5.499.165	18.987.400			100,00	100,00	99,74		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PendampinganPeningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA II Jonggol)			3.304.800	6.124.428	31.826.275			3.304.800	6.111.928	29.243.500			100,00	99,80	91,88		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PendampinganPeningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA III Ciseeng)			3.362.630	5.499.498	23.221.311			3.362.630	5.224.800	20.770.100			100,00	95,01	89,44		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PendampinganPeningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA IV Tamansari)			3.473.060	29.998.233	34.491.600			3.473.060	29.998.233	34.307.690			100,00	100,00	99,47		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA V Leuwisadeng)			3.495.180	5.499.700	19.975.200			3.483.700	5.471.300	19.926.808			99,67	99,48	99,76		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		1.153.491.236	1.471.162.197	2.452.113.311	1.771.173.663	-	1.135.911.562	1.457.562.856	2.360.976.083	1.744.790.790		98,48	99,08	96,28	98,51		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		132.893.968	267.233.465	286.483.922	141.110.409	-	129.085.812	260.645.843	285.047.396	139.018.749		97,13	97,53	99,50	98,52		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100.869.700	221.656.067	165.022.113			97.736.300	215.068.445	163.836.464			96,89	97,03	99,28			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		32.024.268	45.577.398	121.461.809			31.349.512	45.577.398	121.210.932			97,89	100,00	99,79			
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA					46.765.784					46.566.939					99,57		
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA					94.344.625					92.451.810					97,99		
Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota		1.020.597.268	1.127.122.931	2.091.033.389	722.072.629	-	1.006.825.750	1.120.376.123	2.001.760.045	702.538.145		98,65	99,40	95,73	97,29		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota		95.737.500	115.233.933				94.847.500	115.070.440				99,07	99,86				
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota		4.997.950	307.739.003	207.323.000			4.997.950	302.230.458	205.187.530			100,00	98,21	98,97			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		723.358.718	338.279.940	787.436.343			710.477.200	337.426.240	786.577.006			98,22	99,75	99,89			
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				254.952.080				253.493.320						99,43			
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah I Ciawi		52.961.100	56.600.445	81.851.701	73.520.000		52.961.100	56.378.375	81.094.701	73.520.000		100,00	99,61	99,08	100,00		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah II Jonggol		39.497.000	39.915.660	158.810.928	79.683.400		39.497.000	39.915.660	158.053.510	79.489.000		100,00	100,00	99,52	99,76		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III Ciseeng		38.277.650	42.004.115	171.086.674	42.003.498		38.277.650	42.004.115	170.089.517	39.181.800		100,00	100,00	99,42	93,28		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV Tamansari		42.483.500	54.053.410	88.290.022	71.814.425		42.483.500	54.053.410	87.167.800	71.370.395		100,00	100,00	98,73	99,38		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng		23.283.850	42.607.370	205.642.441	50.953.025		23.283.850	42.607.370	127.000.613	49.155.700		100,00	100,00	61,76	96,47		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			26.125.000	26.235.000				26.125.000	26.235.000				100,00	100,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			26.125.000	25.505.000				26.126.000	25.050.000				100,00	98,22			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			26.149.055	25.540.000				26.149.055	25.538.000				100,00	99,99			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			26.151.000	25.370.200				26.151.000	24.343.048				100,00	95,95			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			26.139.000	32.990.000				26.139.000	31.930.000				100,00	96,79			
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK					268.618.281					254.381.250					94,70		
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA I					27.096.000					27.095.000					100,00		
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA II					27.096.000					27.080.000					99,94		
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA III					27.096.000					27.090.000					99,98		
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA IV					27.096.000					27.095.000					100,00		
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA V					27.096.000					27.080.000					99,94		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			76.805.801	74.596.000	907.990.625			76.540.890	74.168.642	903.233.896			99,66	99,43	99,48		
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah			76.805.801	74.596.000				76.540.890	74.168.642				99,66	99,43			
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota					800.000.000					799.828.101					99,98		
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota					34.509.850					30.472.970					88,30		
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota					73.480.775					72.932.825					99,25		
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
Bidang Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana																	

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		286.061.774	572.249.766	1.127.310.600	971.766.476	-	283.511.774	545.913.090	1.072.450.518	941.918.117		99,11	95,40	95,13	96,93		
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		60.973.000	121.929.835	352.268.484	41.706.658	-	60.973.000	121.780.820	319.156.337	41.500.969		100,00	99,88	90,60	99,51		
Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal					8.516.425					8.411.195					98,76		
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)			33.425.000	144.771.937	33.190.233			33.375.000	116.057.050	33.089.774			99,85	80,17	99,70		
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				27.320.850					26.997.650					98,82			
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			8.824.000	103.842.008				8.824.000	101.709.308				100,00	97,95			
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK			8.140.000					8.140.000					100,00				
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah I Ciawi		9.700.000	9.164.790	11.066.564			9.700.000	9.164.790	10.420.900			100,00	100,00	94,17			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah II Jonggol		17.130.050	24.611.510	27.666.835			17.130.050	24.611.510	27.422.029			100,00	100,00	99,12			
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah III Ciseeng		10.339.000	10.097.330	13.149.682			10.339.000	9.998.315	12.810.500			100,00	99,02	97,42			
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah IV Tamansari		13.800.000	16.982.660	16.600.188			13.800.000	16.982.660	16.011.900			100,00	100,00	96,46			
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng		10.003.950	10.684.545	7.850.420			10.003.950	10.684.545	7.727.000			100,00	100,00	98,43			
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		225.088.774	450.319.931	775.042.116	930.059.818	-	222.538.774	424.132.270	753.294.181	900.417.148		98,87	94,18	97,19	96,81		
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain			26.505.000	26.179.750				26.455.000	26.163.500				99,81	99,94			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		1.050.000	83.234.895	87.841.400	60.000.000		1.030.000	75.361.090	85.703.375	59.098.500		98,10	90,54	97,57	98,50		
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		82.146.962	154.667.018	60.261.358	64.923.634		81.776.962	139.832.978	60.145.608	64.723.694		99,55	90,41	99,81	99,69		
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				432.600.000	480.600.000				432.600.000	480.600.000				100,00	100,00		
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		108.306.312	158.692.768	168.159.608	275.735.784		106.146.312	155.262.952	148.681.698	247.705.029		98,01	97,84	88,42	89,83		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain					24.283.500					23.968.925					98,70		
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK		33.585.500	27.220.250		24.516.900		33.585.500	27.220.250		24.321.000		100,00	100,00		99,20		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		10.650.621.561	16.946.612.895	13.925.908.847	14.258.047.786	-	10.523.820.624	15.410.340.021	13.716.996.930	13.616.927.497		98,81	90,93	98,50	95,50		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.107.683.425	1.870.651.986	1.169.855.225	1.354.190.800	-	1.020.172.550	1.864.129.237	1.128.422.475	1.321.008.365		92,10	99,65	96,46	97,55		
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		7.003.050	11.027.550	131.985.350			6.280.550	11.027.550	97.693.850			89,68	100,00	74,02			
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal		20.981.525	44.007.900	22.369.875			20.883.200	43.447.900	22.079.375			99,53	98,73	98,70			
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					94.190.800					88.670.365					94,14		
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		343.258.850					258.469.850					75,30					
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		736.440.000					734.538.950					99,74					

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana					280.000.000					278.600.000					99,50		
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			70.635.000	150.000.000				69.382.000	148.520.000				98,23	99,01			
Promosi Dan Kie Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruan					100.000.000					98.820.000					98,82		
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya			1.216.000.000	520.000.000				1.216.000.000	520.000.000				100,00	100,00			
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)					600.000.000					582.400.000					97,07		
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK CIAWI			80.994.240	53.000.000				79.713.525	52.629.000				98,42	99,30			
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK JONGGOL			80.994.240	53.000.000				80.312.949	52.878.000				99,16	99,77			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK CISEENG			80.994.240	53.000.000				80.312.949	52.163.000				99,16	98,42			
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK TAMANSARI			80.994.240	53.500.000				80.214.079	53.496.750				99,04	99,99			
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK LW SADENG			81.004.476	53.000.000				80.323.185	52.062.500				99,16	98,23			
Pengendalian Program KKBPK			124.000.100	80.000.000				123.395.100	76.900.000				99,51	96,13			
Advokasi Program Bangsa Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja					280.000.000					272.518.000					97,33		
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		3.027.593.000	5.976.019.706	5.078.705.233	4.816.181.420	-	3.015.599.700	5.974.775.066	5.062.285.991	4.802.605.546		99,60	99,98	99,68	99,72		
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB		35.348.750	43.250.100	584.511.815	90.515.250		35.322.150	43.250.100	583.561.815	89.794.050		99,92	100,00	99,84	99,20		
Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		47.870.000	3.278.893.351	3.252.976.295			47.681.300	3.278.019.906	3.242.633.856			99,61	99,97	99,68			
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		2.088.000.000	2.088.000.000	870.000.000	1.305.000.000		2.088.000.000	2.088.000.000	870.000.000	1.305.000.000		100,00	100,00	100,00	100,00		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan I Ciawi		174.733.050	112.481.375	115.844.296	22.697.000		172.033.050	112.481.375	113.820.811	22.609.550		98,45	100,00	98,25	99,61		
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan II Jonggol		204.297.200	146.849.070	61.816.584	29.500.000		201.067.200	146.477.875	61.444.852	29.500.000		98,42	99,75	99,40	100,00		
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan III Ciseeng		133.438.450	68.558.850	36.460.226	22.361.505		132.999.450	68.558.850	35.549.057	20.060.100		99,67	100,00	97,50	89,71		
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan IV Tamansari		162.256.550	114.833.535	92.233.581	26.544.500		159.745.550	114.833.535	90.910.800	26.305.700		98,45	100,00	98,57	99,10		
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan V Leuwisadeng		181.649.000	123.153.425	64.862.436	87.039.450		178.751.000	123.153.425	64.364.800	86.311.050		98,40	100,00	99,23	99,16		
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					3.232.523.715					3.223.025.096					99,71		
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		4.374.568.068	6.710.772.085	5.502.905.231	5.915.194.058	-	4.352.819.812	5.183.266.600	5.361.996.006	5.346.755.602		99,50	77,24	97,44	90,39		
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		2.818.939.668	4.081.631.102	3.452.207.061	5.492.057.058		2.817.511.412	3.457.944.738	3.443.786.014	4.952.386.602		99,95	84,72	99,76	90,17		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah III Ciseeng		4.801.600	5.184.980	6.499.466			4.801.600	5.184.980	6.358.100			100,00	100,00	97,82			
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah IV Tamansari		8.500.500	9.613.105	9.329.204			8.500.500	9.613.105	9.276.400			100,00	100,00	99,43			
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng		6.275.000	9.506.810	9.329.300			6.275.000	9.244.540	9.174.300			100,00	97,24	98,34			
Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah I Ciawi		6.000.000	7.280.000	7.463.270			6.000.000	7.280.000	7.403.270			100,00	100,00	99,20			
Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah II Jonggol		6.425.000	6.126.390	7.463.536			6.425.000	6.126.390	7.438.536			100,00	100,00	99,67			
Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah III Ciseeng		1.232.000	1.030.750	2.080.106			1.232.000	1.030.750	2.018.100			100,00	100,00	97,02			
Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah IV Tamansari		6.425.000	7.679.690	7.463.270			6.425.000	7.679.690	7.427.000			100,00	100,00	99,51			
Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng		5.608.200	7.381.985	7.463.500			5.608.200	7.326.750	7.413.500			100,00	99,25	99,33			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		313.527.000	58.950.000	180.940.000	401.457.000		313.410.000	58.950.000	180.838.000	374.190.000		99,96	100,00	99,94	93,21		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		2.140.777.068	2.389.169.118	2.174.443.158	2.172.481.508	-	2.135.228.562	2.388.169.118	2.164.292.458	2.146.557.984		99,74	99,96	99,53	98,81		
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		61.102.068	67.655.718	82.654.958	93.481.508		57.108.262	66.925.718	82.406.458	93.165.984		93,46	98,92	99,70	99,66		
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		2.040.199.600	2.281.749.500	2.050.171.000			2.040.139.600	2.281.749.500	2.042.251.000			100,00	100,00	99,61			
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					2.079.000.000					2.053.392.000					98,77		
Pembinaan Terpadu Kampung KB		39.475.400	39.763.900	41.617.200			37.980.700	39.493.900	39.635.000			96,21	99,32	95,24			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1.900.285.874	28.684.521.113	28.283.517.072	27.806.496.391	-	1.859.336.574	22.069.848.990	28.240.545.552	27.781.275.448		97,85	76,94	99,85	99,91		
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1.658.326.412	28.490.974.520	28.036.855.072	1.444.354.641	-	1.617.937.812	21.876.923.032	28.006.427.052	1.419.670.838		97,56	76,79	99,89	98,29		
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks)					9.600.000					9.090.000					94,69		
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		199.592.812	182.125.150	300.912.886			199.046.762	179.048.380	298.045.766			99,73	98,31	99,05			
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)					134.910.891					134.150.178					99,44		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		544.174.900	536.553.000	422.559.250			509.881.600	530.207.797	413.716.500			93,70	98,82	97,91			
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					340.904.500					331.842.100					97,34		
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		136.877.000	162.067.000	242.521.125			135.745.450	160.932.000	236.636.375			99,17	99,30	97,57			
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					98.657.800					97.689.000					99,02		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		87.919.350	80.795.800	447.128.200			86.317.450	80.363.400	439.793.875			98,18	99,46	98,36			
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					675.232.050					663.739.200					98,30		
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		609.500.000	27.436.060.000	26.337.300.000			607.200.000	20.833.330.000	26.336.460.000			99,62	75,93	100,00			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		54.308.550	65.258.650	252.672.225			53.792.750	64.972.150	248.427.375			99,05	99,56	98,32			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					185.049.400					183.160.360					98,98		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		5.000.000	3.905.000	4.984.197			5.000.000	3.905.000	4.959.197			100,00	100,00	99,50			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		6.013.850	7.689.575	9.968.764			6.013.850	7.689.575	9.956.264			100,00	100,00	99,87			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		4.999.950	4.262.880	4.983.336			4.999.950	4.262.880	4.901.100			100,00	100,00	98,35			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		5.600.000	8.255.700	8.840.689			5.600.000	8.255.700	8.731.200			100,00	100,00	98,76			

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutanusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		4.340.000	4.001.765	4.984.400			4.340.000	3.956.150	4.799.400			100,00	98,86	96,29			
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		241.959.462	193.546.593	246.662.000	26.362.141.750	-	241.398.762	192.925.958	234.118.500	26.361.604.610		99,77	99,68	94,91	100,00		
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		221.763.462		227.852.000			221.202.762		215.402.000			99,75		94,54			
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		20.196.000	161.208.953	18.810.000	34.441.750		20.196.000	160.608.318	18.716.500	33.904.610		100,00	99,63	99,50	98,44		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaandan Peningkatan Peran SertaOrganisasi Kemasyarakatan danMitra Kerja Lainnya dalamPembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan EkonomiKeluarga/UPP KS)			32.337.640					32.317.640					99,94				
Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/ Balita)					12.537.000.000					12.537.000.000					100,00		
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/ Balita)					13.790.700.000					13.790.700.000					100,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16.065.303.916	14.241.749.969	15.367.740.374	38.340.265.800	-	15.751.831.690	13.906.829.328	14.556.248.688	37.887.939.922		98,05	97,65	94,72	98,82		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		305.688.674	324.320.187	423.433.348	426.858.643	-	297.606.924	314.321.627	414.663.476	405.299.968		97,36	96,92	97,93	94,95		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		165.031.050	160.613.563	180.113.982	208.997.684		161.103.100	156.245.238	176.024.919	199.768.964		97,62	97,28	97,73	95,58		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		35.069.062	17.442.040	19.038.220	47.201.700		34.319.262	16.801.680	17.658.400	46.026.230		97,86	96,33	92,75	97,51		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5* 100	18
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		7.242.600	12.417.143	11.182.281	12.917.375		6.492.600	10.602.855	11.056.500	12.641.440		89,64	85,39	98,88	97,86		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		8.491.300	9.462.115	100.018.300	42.708.525		7.811.300	9.051.955	99.406.000	38.700.200		91,99	95,67	99,39	90,61		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		7.536.200	8.612.680	13.988.539	10.713.300		6.806.200	7.938.800	13.749.200	9.534.050		90,31	92,18	98,29	88,99		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12.166.100	11.415.955	9.964.252	11.486.300		11.816.100	11.375.955	9.745.000	10.444.260		97,12	99,65	97,80	90,93		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		70.152.362	104.356.691	89.127.774	92.833.759		69.258.362	102.305.144	87.023.457	88.184.824		98,73	98,03	97,64	94,99		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.811.472.967	11.749.829.219	11.756.591.730	11.169.976.343	-	11.532.173.960	11.474.010.887	11.195.079.372	11.002.794.388		97,64	97,65	95,22	98,50		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.625.427.743	11.554.293.844	11.484.649.279	10.979.610.238		11.351.750.786	11.280.925.276	10.929.212.796	10.815.461.560		97,65	97,63	95,16	98,50		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		113.827.674	128.746.970	208.004.490	138.768.342		111.642.524	126.857.351	202.937.796	136.296.608		98,08	98,53	97,56	98,22		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		13.864.200	12.118.895	10.074.695	9.225.904		13.375.250	11.963.550	10.011.760	9.117.180		96,47	98,72	99,38	98,82		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		16.559.900	13.838.130	11.129.478	10.230.122		16.542.400	13.742.800	11.090.090	10.180.100		99,89	99,31	99,65	99,51		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		5.537.950		4.692.635			5.210.700		4.223.000			94,09		89,99			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		29.583.000	32.064.895	31.547.928	26.913.234		27.103.100	31.777.460	31.132.630	26.556.110		91,62	99,10	98,68	98,67		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		6.672.500	8.766.485	6.493.225	5.228.503		6.549.200	8.744.450	6.471.300	5.182.830		98,15	99,75	99,66	99,13		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.494.963.560	180.739.170	184.569.740	50.577.784	-	2.494.963.560	180.739.170	184.569.740	50.577.784		100,00	100,00	100,00	100,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		2.494.963.560	173.471.170	184.569.740	50.577.784		2.494.963.560	173.471.170	184.569.740	50.577.784		100,00	100,00	100,00	100,00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			7.268.000					7.268.000					100,00				
Administrasi Umum Perangkat Daerah		360.108.900	625.832.850	706.025.768	769.859.559	-	358.546.550	612.984.385	700.291.749	753.454.731		99,57	97,95	99,19	97,87		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		111.272.900	95.683.700	137.900.059	145.426.375		109.710.650	83.311.282	132.385.089	140.828.600		98,60	87,07	96,00	96,84		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.380.500	8.345.200	7.482.066	17.646.450		7.380.500	8.345.200	7.481.980	16.734.000		100,00	100,00	100,00	94,83		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		82.330.000	90.480.000	68.502.400	120.901.800		82.330.000	90.480.000	68.469.500	117.115.397		100,00	100,00	99,95	96,87		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		14.425.500	44.863.950	20.435.543	31.311.350		14.425.400	44.863.900	20.435.480	25.785.250		100,00	100,00	100,00	82,35		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.472.000	3.038.700	3.269.800			5.472.000	3.038.700	2.666.500			100,00	100,00	81,55		
Fasilitasi Kunjungan Tamu		7.520.000	7.600.000	6.100.000	11.100.000		7.520.000	7.580.000	6.059.000	10.971.200		100,00	99,74	99,33	98,84		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		137.180.000	373.388.000	462.567.000	440.203.784		137.180.000	372.932.003	462.422.000	439.353.784		100,00	99,88	99,97	99,81		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		284.752.650	411.566.700	440.536.563	24.903.714.775	-	282.580.000	393.695.900	427.090.000	24.671.462.166		99,24	95,66	96,95	99,07		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		266.987.500			583.440.000		265.000.000			583.440.000		99,26			100,00		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					22.518.934.300					22.386.537.166					99,41		

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12.238.200	369.114.300	277.929.360	73.415.200		12.130.000	351.536.000	267.040.000	70.675.000		99,12	95,24	96,08	96,27		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5.526.950	42.452.400	162.607.203	1.727.925.275		5.450.000	42.159.900	160.050.000	1.630.810.000		98,61	99,31	98,43	94,38		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		482.492.022	531.563.000	676.525.556	602.770.912	-	474.637.296	515.910.059	611.375.851	590.823.101		98,37	97,06	90,37	98,02		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		126.099.830	155.098.980	226.364.036	209.126.368		119.594.616	139.734.728	163.756.758	197.178.703		94,84	90,09	72,34	94,29		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		356.392.192	376.464.020	450.161.520	393.644.544		355.042.680	376.175.331	447.619.093	393.644.398		99,62	99,92	99,44	100,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		325.825.143	417.898.843	1.180.057.669	416.507.784	-	311.323.400	415.167.300	1.023.178.500	413.527.784		95,55	99,35	86,71	99,28		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		229.875.000	303.865.000	302.317.000	294.400.000		217.249.400	301.941.800	301.708.500	292.950.000		94,51	99,37	99,80	99,51		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		49.660.143	53.053.843	817.690.669			47.784.000	52.285.500	661.420.000			96,22	98,55	80,89			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		46.290.000	60.980.000	60.050.000	122.107.784		46.290.000	60.940.000	60.050.000	120.577.784		100,00	99,93	100,00	98,75		

2.1.4. Kelompok Sasaran layanan

Dalam mencapai kinerja tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh mitra kerja yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, Lembaga/Organisasi Perempuan dan organisasi Masyarakat dan BUMD melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

TABEL 2.7 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DP3AP2KB

No	Bentuk Kegiatan	Mitra Kerja	Keterangan
1.	P2WKSS	72 Perangkat Daerah, PDAM, BJB	Mendukung dalam pemenuhan sarana di Lokasi Desa P2WKSS
2.	Hari Ibu	Perangkat Daerah terkait, GOW, IWAPI, KPPI, Darma Wanita, PDAM, BJB	Mendukung dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Penanganan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Dinkes, RSUD, Kecamatan, Polres, Pengadilan Negeri	Mendukung dalam penanganan medis dan hukum
4.	Penilaian Kabupaten Layak Anak	Perangkat Daerah, Perusahaan Swasta, Sekolah, BUMN	Mendukung dalam memenuhi sarana di 5 kluster KLA
5.	Pelayanan KB	Dinas Kesehatan, RSUD, Rumah Sakit TNI dan Rumah Sakit Swasta, Kodim, TP. PKK, IBI, IDI, Kader KB Tingkat Desa dan Kecamatan, PKB, TPD	Mendukung dalam memenuhi sarana dan pelaksanaan kegiatan
6.	Pembentukan Kampung KB	RT, RW, Desa, Kecamatan dan Masyarakat	Mendukung dalam pelaksanaan Kampung KB dalam upaya meningkatkan kualitas hidup Masyarakat di Tingkat kampung melalui program Bangga Kencana
7.	Pendataan keluarga	Kecamatan, Desa, Penyuluh KB, Tenaga Penggerak Desa, Kader KB Tk. Desa dan Kecamatan	Mendukung dalam memenuhi kebutuhan Data Program Bangga Kencana

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Sub bab ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, sebagai wujud tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

2.2.1. Permasalahan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, adalah sebagai berikut :

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan DP3AP2KB yang berpengaruh pada kinerja DP3AP2KB terdapat pada tabel 2.7

TABEL 2.8 KERTAS KERJA PERUMUSAN PERMASALAHAN DP3AP2KB

URAIAN	PERMASALAHAN
Identifikasi berdasarkan pencapaian kinerja (IKU, IKK)	Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum optimalnya layanan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak
	Belum berkembangnya usaha ekonomi produktif, khususnya yang dikelola perempuan
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak
	Belum optimalnya kesadaran keluarga untuk ber-KB
	Belum optimalnya pemahaman keluarga tentang fungsi keluarga
	Belum optimalnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
Identifikasi berdasarkan hasil analisis KLHS	Kekerasan anak
	Kekerasan terhadap perempuan
	Bullying

URAIAN	PERMASALAHAN
	Kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan dan ekonomi
	Kurangnya sarana prasarana pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus
	Kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan dan ekonomi
	Masih terbatasnya pemakaian metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP di masyarakat)
	Pelayanan kesehatan sekiranya belum mampu menyediakan pelayanan yang cepat yang dikarenakan tidak sebandingnya fasilitas dan tenaga kerja dengan banyaknya masyarakat
Identifikasi berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi oleh PD	Masih terbatasnya pemahaman perempuan tentang perlindungan dan hak perempuan
	Belum optimalnya informasi mengenai pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Masih terbatasnya pemberdayaan Satgas dan Gugus PPA
	Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang fungsi keluarga
Identifikasi faktor-faktor lainnya	Masih terbatasnya sarana kerja di Dinas, UPT PPA Wilayah Timur dan UPT PPA Wilayah Barat
	Belum terpenuhinya kendaraan roda 4 untuk mobil perlindungan perempuan dan anak di UPT PPA
	Belum adanya Gedung UPT PPA Wilayah Timur dan UPT PPA Wilayah Barat, sehingga kondisi gedung masih sewa

TABEL 2.9 KERTAS KERJA PERUMUSAN ISU STRATEGIS DP3AP2KB

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Seluruh Desa/Kelurahan	Belum terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1. Isu Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) - TPB 5 : Kesetaraan Gender (menempati urutan ke 2 pada % gap belum tercapai). Hal ini mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam pembangunan serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan masih memerlukan intervensi lebih lanjut	1. Perubahan Iklim dan Bencana Alam: A). Peningkatan Kekerasan Pasangan: Setelah bencana alam seperti badai, banjir, atau kekeringan, penelitian menunjukkan adanya peningkatan kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan terhadap perempuan. Tekanan ekonomi, kehilangan tempat tinggal, dan trauma psikologis akibat bencana dapat memicu atau memperburuk konflik dalam rumah tangga. B). Pernikahan Dini: Di wilayah yang terdampak kekeringan atau krisis pangan akibat perubahan	1. Polusi dan Kesehatan: - Kekerasan Akibat Stres dan Frustrasi: Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi partiatlate matter 2,5 World Heatth Organization, 202 l). Dampak kesehatan akibat polusi, seperti masalah pernapasan atau penyakit kronis, dapat menyebabkan stres dan frustrasi dalam keluarga, yang berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga.	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks kualitas lingkungan hidup digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. Tahun 2022, indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bogor mencapai 58,91 poin. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 60,61 poin. Berbeda dengan tahun 2024, indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bogor mengalami penurunan menjadi 59,72 poin.	Kesetaraan Gender
Berdasarkan hasil identifikasi kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024, maka daerah yang berpotensi menjadi kewenangan PD Perlindungan Perempuan adalah : 1. Cibinong (17 Kasus). 2.Bojong Gede (10 Kasus)	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak					Kekerasan terhadap perempuan dan anak
Cibinong, Bojong Gede, Tajur Halang, Gunung Putri	Belum Optimalnya Layanan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Seluruh Desa/Kelurahan	Belum Berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif, Khususnya Yang Dikelola Perempuan	2. Identifikasi Isu Berdasarkan Konsultasi Publik 1 - Pilar Sosial a. Perlindungan Anak, Perempuan, dan Golongan Rentan 1) Kekerasan anak 2) Kekerasan thdp perempuan 3) Bullying 4) Kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan dan ekonomi 5) Kurangnya sarana prasarana pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus 6) Kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan dan ekonomi	iklim, keluarga mungkin terpaksa menikahkan anak perempuan mereka di usia muda sebagai mekanisme koping untuk mengurangi beban ekonomi. 2). Kekurangan Sumber Daya Alam: A). Persaingan atas sumber daya alam yang semakin menipis dapat memicu konflik di tingkat komunitas. Dalam situasi ini, perempuan dan anak perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan sebagai taktik perang atau sebagai dampak samping dari konflik.			Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai Kepala Keluarga
Seluruh Desa/Kelurahan	Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak					Pemenuhan Hak Anak
Seluruh Desa/Kelurahan	Belum Optimalnya Kesadaran Keluarga untuk ber-KB					Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
Seluruh Desa/Kelurahan	Belum Optimalnya Pemahaman Keluarga tentang Fungsi Keluarga					Fungsi Keluarga dalam Upaya Pencegahan Stunting
Seluruh Desa/Kelurahan	Belum Optimalnya Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		3. Identifikasi Isu Berdasarkan Perencanaan Strategis yang Relevan a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 - Misi kelima: kesetaraan gender dan inklusi sosial				

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2025-2030.

3.1 Tujuan Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengacu pada sasaran kepala daerah. Tujuan merupakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak/impact. Untuk mencapai tujuan, diperlukan alat ukur/indikator yang dapat memperlihatkan ketercapaian tujuan selama lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Bogor dan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap PD.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor menetapkan tujuan di tahun 2025 dengan menyesuaikan kondisi pembangunan prioritas dan adanya mengacu pada sasaran Kepala Daerah.

Visi Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 :

Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang

Misi Kabupaten Bogor :

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
- 4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;**
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk tercapainya tujuan di atas, maka ditetapkan Sasaran Kepala Daerah tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi
2. Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan
4. Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah
5. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Meningkatnya ketahanan bencana
7. Meningkatnya akses layanan Pendidikan
8. Meningkatnya akses layanan Kesehatan
- 9. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender**
10. Menurunnya kemiskinan
11. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2016 pasal 11 bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan wajib non Pelayanan dasar. Untuk itu, keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran Kepala daerah kabupaten Bogor dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, yaitu pada :

➤ **Misi**

Misi ke empat : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

➤ **Tujuan**

Tujuan ke empat : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

➤ **Sasaran**

Sasaran ke sembilan : Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan Gender

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki komitmen kuat untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Bogor, yaitu Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang, dengan misi ke-4 Kabupaten Bogor yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, dan sasaran ke-9 Kabupaten Bogor yaitu Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Selaras dengan visi dan misi Kabupaten Bogor tersebut, DP3AP2KB menetapkan Tujuan Dinas yaitu Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dengan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB.

Dengan melihat misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana menetapkan tujuan dan indikator Dinas dengan mengacu pada sasaran Kepala Daerah dengan menggunakan alat ukur dua indikator untuk dua sub urusan pada tabel 3.1

3.2 Sasaran Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu satu tahun. Sasaran merupakan impact/dampak yang ingin dicapai oleh kepala perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap PD.

Sasaran yang ingin dicapai menjadi representasi kepala perangkat daerah dengan indikator yang tepat untuk menghitung sejauhmana ketercapaian target.

Sasaran-sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor merumuskan Tujuan dan sasaran, serta indikator dan target diuraikan dalam tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB TAHUN 2025-2029

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KETERANGAN	RUMUS
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Terwujudnya Masyarakat yang Beretika dan Berbudaya	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,575	0,572	0,568	0,565	0,562	0,560		$1 - [(Indikator\ Kesehatan\ reproduksi \times 1/3) + (Indikator\ Pemberdayaan \times 1/3) + (Indikator\ Partisipasi\ Angkatan\ Kerja \times 1/3)]$
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	63,88	64,20	64,52	64,85	65,17	65,50		$(Nilai\ Indeks\ Kluster\ Hak\ Sipil\ dan\ Kebebasan \times 20\%) + (Nilai\ Indeks\ Kluster\ Lingkungan\ Keluarga\ dan\ Pengasuhan\ Alternatif \times 22\%) + (Nilai\ Indeks\ Kluster\ Kesehatan\ Dasar\ dan\ Kesejahteraan \times 18\%) + (Nilai\ Indeks\ Kluster\ Pendidikan,\ Pemanfaatan\ Waktu\ Luang\ dan\ Kegiatan\ Budaya \times 18\%) + (Nilai\ Indeks\ Kluster\ Perlindungan\ Khusus \times 22\%) / 5$

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KETERANGAN	RUMUS
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Angka kelahiran total (TFR)	Anak	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92		$TFR = \frac{1}{1000} \times \left[5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i \right]$ Dengan $ASFR_i = \frac{Bi}{Pi} \times 100$ <i>Bi</i> : Jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur <i>i</i> <i>Pi</i> : jumlah wanita kelompok umur <i>ASFR_i</i> :Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur
			Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB	Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi	%	35,40	35,93	36,47	37,02	37,57	38,14		Jumlah Penduduk perempuan yang bekerja / Jumlah angkatan kerja perempuan x 100
				Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya		Capaian dari 31 Indikator KLA Pratama = 500-600 Madya = 601-700 Nindya = 701-800 Utama = 801-900 KLA = 901-1000

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KETERANGAN	RUMUS
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))	%	60,80	61,60	62,30	63,10	63,80	64,60		Jumlah peserta KB Aktif Modern/Jumlah Pasangan Usia Subur x 100

3.3 Arah Kebijakan DP3AP2KB dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan :

TABEL 3.2 ARAH KEBIJAKAN DP3AP2KB

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lembaga Pemerintah Pemerintah	
2			Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	
3			Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	
4			Meningkatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	
5			Meningkatkan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi dengan instansi/Lembaga terkait	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
6			Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
7			Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	
8			Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	
9			Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	
10			Meningkatkan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	
11			Meningkatkan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	
12			Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	
13			Meningkatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
14			Meningkatkan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Terkait	
15			Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	
16	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Menguatkan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	
17			Meningkatkan Kualitas dan Pemanfaatan Data/Informasi Kependudukan	
18			Meningkatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	
19			Meningkatkan Pendayagunaan Penyuluh KB (PKB) dan Institusi Masyarakat	
20			Meningkatkan Kepesertaan Ber-KB	
21			Meningkatkan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kejahteraan Keluarga	

3.4 Strategi DP3AP2KB dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Strategis adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang

dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra dengan mempertimbangkan SDM, fokus dan pentahapan (waktu/tahun pelaksanaan). Strategi DP3AP2KB dituangkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**TABEL 3.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN PENAHAPAN RENSTRA DP3AP2KB
TAHUN 2025-2030**

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
	Pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
	1. Pelatihan Relawan PPA 2. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 3. Penjangkauan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (UPT)	1. Pelatihan Relawan PPA 2. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 3. Penjangkauan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (UPT)	1. Pelatihan Relawan PPA 2. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 3. Penjangkauan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (UPT)	1. Pelatihan Relawan PPA 2. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 3. Penjangkauan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (UPT)	1. Pelatihan Relawan PPA 2. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 3. Penjangkauan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (UPT)
	Pelaksanaan Isbat Nikah, Kegiatan P2WKSS, Pembinaan dan Pembentukan Kelompok PEKKA	Pelaksanaan Isbat Nikah, Kegiatan P2WKSS, Pembinaan dan Pembentukan Kelompok PEKKA	Pelaksanaan Isbat Nikah, Kegiatan P2WKSS, Pembinaan dan Pembentukan Kelompok PEKKA	Pelaksanaan Isbat Nikah, Kegiatan P2WKSS, Pembinaan dan Pembentukan Kelompok PEKKA	Pelaksanaan Isbat Nikah, Kegiatan P2WKSS, Pembinaan dan Pembentukan Kelompok PEKKA
	1. Advokasi dan Sosialisasi Data Gender dan Anak 2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Membuat Aplikasi Laporan Data Perempuan dan Anak	1. Advokasi dan Sosialisasi Data Gender dan Anak 2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	1. Advokasi dan Sosialisasi Data Gender dan Anak 2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	1. Advokasi dan Sosialisasi Data Gender dan Anak 2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak
	1. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (Sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak pada 4 Kecamatan, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah pada 10 Kecamatan) 2. Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (Sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak pada 4 Kecamatan, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah pada 10 Kecamatan) 2. Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (Sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak pada 4 Kecamatan, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah pada 10 Kecamatan) 2. Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (Sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak pada 4 Kecamatan, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah pada 10 Kecamatan) 2. Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (Sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak pada 4 Kecamatan, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah pada 10 Kecamatan) 2. Evaluasi Kabupaten Layak Anak

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2. Penjangkauan dan Pendampingan Korban Kekerasan (UPT)	1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2. Penjangkauan dan Pendampingan Korban Kekerasan (UPT)	1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2. Penjangkauan dan Pendampingan Korban Kekerasan (UPT)	1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2. Penjangkauan dan Pendampingan Korban Kekerasan (UPT)	1. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2. Penjangkauan dan Pendampingan Korban Kekerasan (UPT)
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Midan, SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Midan, SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Midan, SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Midan, SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana	Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana	Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana	Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana	Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana	Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana
Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan Pelayanan KB MKJP	Peningkatan Pelayanan KB MKJP (Pelayanan KB MKJP di 101 Puakesmas Kabupaten Bogor)	Peningkatan Pelayanan KB MKJP (Pelayanan KB MKJP di 101 Puakesmas Kabupaten Bogor)	Peningkatan Pelayanan KB MKJP (Pelayanan KB MKJP di 101 Puakesmas Kabupaten Bogor)	Peningkatan Pelayanan KB MKJP (Pelayanan KB MKJP di 101 Puakesmas Kabupaten Bogor)	Peningkatan Pelayanan KB MKJP (Pelayanan KB MKJP di 101 Puakesmas Kabupaten Bogor)
Pelaksanaan Kelas Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan	Pelaksanaan Kelas Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan	Pelaksanaan Kelas Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan	Pelaksanaan Kelas Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan	Pelaksanaan Kelas Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan	Pelaksanaan Kelas Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan
Peningkatan peran aktif kelompok ketahanan keluarga (ToT Kader pada 20 kecamatan lokus stunting, kelas 1000 HPK di 20 kecamatan lokus stunting)	Peningkatan peran aktif kelompok ketahanan keluarga (ToT Kader pada 20 kecamatan lokus stunting, kelas 1000 HPK di 20 kecamatan lokus stunting)	Peningkatan peran aktif kelompok ketahanan keluarga (ToT Kader pada 20 kecamatan lokus stunting, kelas 1000 HPK di 20 kecamatan lokus stunting)	Peningkatan peran aktif kelompok ketahanan keluarga (ToT Kader pada 20 kecamatan lokus stunting, kelas 1000 HPK di 20 kecamatan lokus stunting)	Peningkatan peran aktif kelompok ketahanan keluarga (ToT Kader pada 20 kecamatan lokus stunting, kelas 1000 HPK di 20 kecamatan lokus stunting)	Peningkatan peran aktif kelompok ketahanan keluarga (ToT Kader pada 20 kecamatan lokus stunting, kelas 1000 HPK di 20 kecamatan lokus stunting)
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program ditujukan untuk menjawab strategis, sedangkan kegiatan ditujukan untuk menjawab arah kebijakan. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel 4.1, Penjabaran program DP3AP2KB dijabarkan dalam tabel 4.2, Program prioritas DP3AP2KB terdapat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

TABEL 4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DP3AP2KB

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
					Angka kelahiran Total (TFR)		
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB			Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi		
					Kategori Kabupaten Layak Anak		
					Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya Kualitas Perangkat Daerah tentang Standar Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Memahami tentang Pelembagaan PUG	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan PUG di Tingkat Provinsi	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Kab/Kota yang Mendapatkan Pendampingan	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi (Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah)	Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Masyarakat dan Perempuan yang Mendapatkan Sosialisasi tentang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Masyarakat, Perempuan Potensial, Perempuan Penyintas Kekerasan dan atau Rentan Lainnya yang Mendapatkan Bimtek atau Pelatihan	Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga yang berpartisipasi dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi(KIE)Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Pendampingan	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Bimtek Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP Tingkat Provinsi yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi	Mengamati, Menilai, dan Melaporkan Efektivitas Program dan Kegiatan Lembaga Penyedia Layanan dalam Memberdayakan Perempuan, dengan Fokus pada Pengumpulan Data, Analisis Pencapaian, Identifikasi Tantangan, serta Penyusunan Laporan yang Memberikan Gambaran Tentang Dampak dan Kinerja Lembaga dalam Meningkatkan Kualitas Layanan di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Tertanganinya Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Ktp Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan di Tingkat Masyarakat, Serta Kab/Kota	Jumlah Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Ktp Tingkat Provinsi, Masyarakat, serta Kab/Kota	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Penanganan dengan Instansi Terkait	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tercapainya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya Keluarga Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar		Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Persentase Lembaga yang dapat Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kepada Kengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/ kota, sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.	
				Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Hak Anak Melalui Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang terbina	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Pendampingan	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Hak Anak melalui Penyediaan Layanan bagi Keluarga yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kerja	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Layanan Penjangkauan Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Layanan Penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan Penjangkauan Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Tersedianya Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Persentase Dokumen Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah Stakeholder yang Diadvokasi dan Berpartisipasi dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	
				Terlaksananya Penguatan dan Peningkatan Kualitas Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Hasil Pencatatan dan Pelaporan Melalui Simfoni PPA	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Peningkatan Kualitas Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Hasil Pencatatan dan Pelaporan Melalui Simfoni PPA	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Hasil Pencatatan dan Pelaporan Melalui Simfoni PPA	
			Terpenuhi Hak Anak Secara Komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Meningkatnya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	Persentase Kegiatan Pelembagaan Penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD Kab/Kota yang Mendapatkan Bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Kab/Kota yang Mendapatkan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimtek	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Tertanganinya Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Meningkatnya Kerja Sama Lembaga dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Persentase Lembaga yang Mengikuti Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	Jumlah Kegiatan Pencegahan KtA Terpadu	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kta Tingkat Kab/Kota	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas kepada SDM yang Terkait Langsung Pencegahan KtA	Jumlah SDM yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas kepada SDM yang Terkait Langsung Pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	
				Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Layanan AMPK yang Terintegrasi dan Komprehensif	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pendampingan Korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Lembaga yang berpartisipasi dalam Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan AMPK	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Penguatan Kapasitas SDM Penyedia Layanan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/	
				Terlaksananya Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pendampingan	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terpenuhinya Layanan Kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Sesuai dengan Ketentuan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Berfungsinya Barang Milik Daerah dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Terkendalinya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun dalam Menekan Pertumbuhan Jumlah Penduduk		Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
				Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	
				Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Midan, SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Midan, SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
				Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Persentase Data Program Bangga Kencana yang Tersedia	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
				Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
				Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
				Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
				Terlaksananya Penyusunan Profil Program Bangga Kencana Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi (Termasuk Diseminasi dan Evaluasi Hasil Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Meningkatnya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
				Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
				Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Persentase Kampung Keluarga Berklasifikasi Mandiri		
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Tercapainya Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga		Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terbinanya Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Terbina	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA))	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
				Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	
				Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN : URUSAN NON PELAYANAN DASAR

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada Belanja APBD	%	35,10	292.721.078													
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%			33,61	677.177.274	33,14	4.059.358.616	31,00	3.897.596.078	31,84	3.888.973.371	31,33	4.054.885.161	29,76	4.308.642.261	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Memahami tentang Pelembagaan PUG	%	100,00	105.932.934	34,38	33.657.084	59,38	1.383.899.818	56,25	1.364.940.646	50,00	1.207.687.678	53,13	1.252.072.063	62,50	1.298.175.665	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					3	149.999.875	4	152.500.000	5	55.125.000	5	57.881.250	5	60.775.313	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	26.152.639	1	33.657.084											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	Laporan					1	233.900.318	1	240.595.646	1	147.625.428	1	155.006.700	1	162.757.034	
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	23	79.780.295													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan PUG di Tingkat Provinsi	Kebijakan					3	500.000.000	4	205.250.000	4	215.512.500	4	226.288.125	4	237.602.531	
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Kab/Kota yang Mendapatkan Pendampingan	Lembaga					2	499.999.625	2	510.000.000	2	520.000.000	2	530.000.000	2	540.000.000	
Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi (Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah)	Lembaga							2	256.595.000	2	269.424.750	2	282.895.988	2	297.040.787	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100,00	100.860.860			60,00	692.056.748	50,00	615.834.168	80,00	646.625.876	90,00	678.957.170	90,00	712.905.029	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.860.860													
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Masyarakat dan Perempuan yang Mendapatkan Sosialisasi tentang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi	Orang					200	222.381.723	200	136.158.964	150	142.966.912	150	150.115.258	150	157.621.021	
Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, atau Hukum, atau Sosial, dan atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Masyarakat, Perempuan Potensial, Perempuan Penyintas Kekerasan dan atau Rentan Lainnya yang Mendapatkan Bimtek atau Pelatihan	Orang					60	469.675.025	63	479.675.204	66	503.658.964	69	528.841.912	72	555.284.008	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	100,00	85.927.284													
	Persentase Lembaga yang berpartisipasi dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%			75,00	643.520.190	77,00	1.983.402.050	78,00	1.916.821.264	79,00	2.034.659.817	80,00	2.123.855.928	81,00	2.297.561.567	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga			2	624.999.150											
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	85.927.284	2	18.521.040											
Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Pendampingan	Lembaga					4	750.000.000	4	621.749.112	4	674.834.056	4	696.038.880	4	911.629.688	
Peningkatan Kapasitas lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Bimtek	Orang					120	399.999.900	63	419.999.895	66	440.999.890	69	463.049.884	72	486.202.378	
Mengamati, Menilai, dan Melaporkan Efektivitas Program dan Kegiatan Lembaga Penyedia Layanan dalam Memberdayakan Perempuan, dengan Fokus pada Pengumpulan Data, Analisis Pencapaian, Identifikasi Tantangan, serta Penyusunan Laporan yang Memberikan Gambaran Tentang Dampak dan Kinerja Lembaga dalam Meningkatkan Kualitas Layanan di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP Tingkat Provinsi yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi	Lembaga					1	833.402.150	1	875.072.257	1	918.825.871	1	964.767.164	1	899.729.501	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	4,37	211.323.859													
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	50.348.685	100,00	834.456.345	100,00	769.189.020	100,00	811.918.105	100,00	846.767.766	100,00	914.690.039	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bogor	%	100,00	94.960.789													
	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	%			7,12	4.985.000	20,99	250.126.625	20,99	262.632.956	20,99	275.764.604	19,34	289.552.834	17,70	304.030.476	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	94.960.789	4	4.985.000											
Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Ktp Tingkat Provinsi, Masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga					115	250.126.625	115	262.632.956	115	275.764.604	106	289.552.834	97	304.030.476	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%			100,00	11.924.110	100,00	337.326.375	100,00	294.665.434	100,00	313.668.340	100,00	323.605.512	100,00	365.369.672	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan			2	11.924.110											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					149	337.326.375	155	294.665.434	160	313.668.340	165	323.605.512	170	365.369.672	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Relawan PPA yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	100,00	116.363.070													
	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%			9,12	33.439.575	35,04	247.003.345	35,58	211.890.630	35,95	222.485.161	36,31	233.609.420	36,68	245.289.891	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30	116.363.070	50	33.439.575											
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang					192	247.003.345	195	211.890.630	197	222.485.161	199	233.609.420	201	245.289.891	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Pemenuhan Ekonomi Keluarga yang Dikontribusi Oleh Perempuan	%	3,65	286.306.849													
	Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%			16,78	220.241.110	33,56	4.311.499.452	50,34	3.609.380.551	67,13	2.310.243.759	83,91	2.348.866.487	100,00	2.413.077.253	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dapat Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	%	0,002	244.494.849	24,05	119.474.110	27,49	3.363.040.650	23,51	3.209.546.686	19,17	1.409.680.111	18,81	1.400.261.657	20,43	1.436.559.182	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	244.494.849	2	119.474.110											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kepada Kengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Jumlah Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					1500	3.363.040.650	1000	3.209.546.686	350	1.409.680.111	350	1.400.261.657	350	1.436.559.182	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang berkerjasama pada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor yang terbina	%	0,0026	41.812.000													
	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang terbina	%			10,18	64.767.000	25,05	767.226.326	14,29	261.233.865	24,27	755.033.648	25,24	795.798.330	25,64	816.071.246	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	85	41.812.000	150	64.767.000											
Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga					43	181.232.376	38	138.600.000	23	139.740.000	31	149.740.000	22	137.710.000	
Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga					85	585.993.950	35	122.633.865	101	615.293.648	98	646.058.330	109	678.361.246	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%															
	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kerja	%			8,41	36.000.000	13,70	181.232.476	22,11	138.600.000	22,70	145.530.000	23,87	152.806.500	25,44	160.446.825	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan			144	36.000.000											
Layanan Penjangkauan Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Layanan Penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang					11000	181.232.476	8000	138.600.000	9000	145.530.000	10000	152.806.500	10000	160.446.825	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak	%	34,15	157.961.199													
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%			6,74	97.368.557	13,47	660.550.754	20,21	662.475.120	26,95	711.188.965	33,68	758.514.410	40,42	824.399.479	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Data Gender dan Anak yang ada Dalam Kelembagaan Data di Kabupaten Bogor	%	100,00	157.961.199													
	Persentase Dokumen Gender dan Anak	%			100,00	97.368.557	100,00	660.550.754	100,00	662.475.120	100,00	711.188.965	100,00	758.514.410	100,00	824.399.479	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	115.148.099	2	84.365.584											
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	42.813.100	2	13.002.973											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen					2	323.655.347	2	318.138.512	2	342.748.794	2	396.491.717	2	424.246.137	
Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah Stakeholder yang Diadvokasi dan Berpartisipasi dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	Lembaga					1	121.809.914	1	130.336.608	1	139.460.171	1	149.222.382	1	159.667.949	
Penguatan dan Peningkatan Kualitas Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Hasil Pencatatan dan Pelaporan Melalui Simfoni PPA	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan dan Peningkatan Kualitas Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Hasil Pencatatan dan Pelaporan Melalui Simfoni PPA	Dokumen					1	215.085.493	1	214.000.000	1	228.980.000	1	212.800.311	1	240.485.393	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Poin	639,91	246.925.959													
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%			58,35	182.230.634	59,15	1.152.195.829	59,85	1.187.951.160	60,45	1.311.061.095	60,95	1.449.348.517	61,35	1.635.480.158	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha di Kabupaten Bogor	%	100,00	145.381.969													
	Persentase Kegiatan Pelebagaan Penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	%			100,00	89.077.084	100,00	980.442.443	100,00	1.027.967.353	100,00	1.135.078.907	100,00	1.255.768.110	100,00	1.422.541.710	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	40	68.501.790	10	7.854.150											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	76.880.179	1	81.222.934											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga					3	100.462.075	5	110.508.283	5	121.559.111	5	133.715.022	7	149.760.825	
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD Kab/Kota yang Mendapatkan Bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					72	369.983.125	72	356.462.103	75	396.423.132	75	430.904.824	80	498.694.830	
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Kab/Kota yang Mendapatkan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga					1	509.997.243	1	560.996.967	1	617.096.664	1	691.148.264	1	774.086.055	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100	101.543.990													
	Persentase Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%			100,00	93.153.550	100,00	171.753.386	100,00	159.983.807	100,00	175.982.188	100,00	193.580.407	100,00	212.938.448	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	78.159.895	2	85.153.150											
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	25	23.384.095	2	8.000.400											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimtek	Orang					50	171.753.386	65	159.983.807	80	175.982.188	95	193.580.407	100	212.938.448	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	1.296.812.825													
	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	953.370.964	100,00	1.856.648.743	100,00	1.705.306.760	100,00	1.886.971.238	100,00	2.057.492.303	100,00	2.311.020.108	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang mengikuti Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	%	100,00	139.018.749	13,95	62.933.014	19,38	956.648.743	29,07	1.052.313.617	38,76	1.157.544.980	48,45	1.264.138.446	58,14	1.380.749.988	
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KtA Terpadu	Kegiatan	3	46.566.939	2	62.933.014											
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan /Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Orang	60	92.451.810													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					1	252.369.993	1	277.606.992	1	305.367.692	1	326.743.430	1	349.615.470	
Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kta Tingkat Kab/Kota	Kegiatan					1	344.278.800	1	378.706.680	1	416.577.348	1	458.235.083	1	504.058.591	
Peningkatan Kapasitas kepada SDM yang Terkait Langsung Pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang					100	359.999.950	105	395.999.945	110	435.599.940	116	479.159.933	121	527.075.927	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	254.388.281													
	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani																
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	1697	254.388.281													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang berpartisipasi dalam Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	100,00	903.405.795	100,00	890.437.950	25,00	900.000.000	50,00	652.993.143	50,00	729.426.258	50,00	793.353.857	50,00	930.270.120	
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan AMPK	Kegiatan	1	800.000.000	1	852.631.475											
Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	42	30.472.970	100	37.806.475											
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	1	72.932.825													
Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Pendampingan	Lembaga					1	900.000.000	2	652.993.143	2	729.426.258	2	793.353.857	2	930.270.120	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	37.887.939.922	BB	15.573.509.543	BB	19.934.933.422	BB	21.359.236.101	BB	22.521.054.784	BB	23.592.445.504	BB	25.186.677.786	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	71,25	405.299.968	100,00	262.036.968	100,00	503.597.268	100,00	528.777.131	100,00	555.215.987	100,00	582.976.786	100,00	612.125.626	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	199.768.964	3	112.700.909	3	178.253.643	3	187.166.325	3	196.524.641	3	206.350.873	3	216.668.417	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	46.026.230	1	21.637.500	1	23.450.525	1	24.623.051	1	25.854.204	1	27.146.914	1	28.504.260	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	12.641.440	1	11.854.250	1	16.427.825	1	17.249.216	1	18.111.677	1	19.017.261	1	19.968.124	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6	38.700.200	2	12.694.850	2	76.569.575	2	80.398.054	2	84.417.956	2	88.638.854	2	93.070.797	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6	9.534.050	3	11.826.700	2	14.434.325	2	15.156.041	2	15.913.843	2	16.709.535	2	17.545.012	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	10.444.260	1	10.969.525	1	16.917.700	1	17.763.585	1	18.651.764	1	19.584.352	1	20.563.570	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	88.184.824	19	80.353.234	19	132.888.175	19	139.532.584	19	146.509.213	19	153.834.674	19	161.526.407	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen					1	44.655.500	1	46.888.275	1	49.232.689	1	51.694.323	1	54.279.039	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	100,00	11.002.794.388	98,00	11.889.909.636	98,00	12.007.228.769	98,00	14.421.511.007	98,00	15.163.164.027	98,00	15.943.957.437	98,00	16.766.053.985	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	159	10.815.461.560	47	11.677.541.693	53	11.677.520.783	64	14.009.961.607	64	14.710.459.687	64	15.445.982.672	64	16.218.281.805	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	136.296.608	1	112.961.368	2	225.583.536	2	268.142.000	2	294.956.200	2	324.451.820	2	356.897.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	9.117.180	2	8.135.925	1	19.986.750	1	23.985.500	1	26.384.050	1	29.022.455	1	31.924.700	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	10.180.100	1	8.125.075	1	22.707.025	1	29.977.900	1	32.975.690	1	36.273.250	1	39.900.585	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen							1	11.870.000	1	13.057.000	1	14.362.700	1	15.798.970	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Laporan	9	26.556.110	12	77.880.025	3	47.250.050	3	57.975.000	3	63.772.500	3	70.149.750	3	77.164.725	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	6	5.182.830	1	5.265.550	2	14.180.625	2	19.599.000	2	21.558.900	2	23.714.790	2	26.086.200	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100,00	50.577.784	90,00	26.820.310	90,00	241.261.620	90,00	253.324.701	90,00	265.990.936	90,00	279.290.483	90,00	293.255.007	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	27	50.577.784	9	26.820.310	9	241.261.620	9	253.324.701	10	265.990.936	10	279.290.483	11	293.255.007	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	90,00	753.454.731	80,00	404.426.934	80,00	875.778.043	80,00	1.119.566.946	80,00	1.365.545.293	80,00	1.401.036.764	80,00	1.860.799.932	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	140.828.600	6	121.201.925	21	338.894.750	22	355.839.488	23	373.631.462	24	392.313.035	26	411.928.687	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	16.734.000	1	61.390.925	4	21.932.575	4	23.029.204	4	24.180.664	5	25.389.697	5	170.945.429	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	117.115.397	2	77.393.150	8	124.130.500	8	130.337.025	9	136.853.876	9	143.696.570	10	150.881.399	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	25.785.250	8	37.185.500	36	49.905.800	38	52.401.090	40	55.021.145	42	57.772.202	44	110.660.812	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	30	2.666.500	10	2.757.650	10	4.044.250	11	4.246.463	11	4.458.786	12	4.681.725	12	6.915.811	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	10.971.200	12	3.366.000	48	34.435.500	48	36.157.275	48	37.965.139	48	39.863.396	48	141.856.565	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	439.353.784	12	101.131.784	48	302.434.668	48	517.556.401	48	733.434.221	48	737.320.139	48	867.611.229	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Sesuai dengan Ketentuan	%	100,00	24.671.462.166	80,00	905.995.515	80,00	2.784.113.250	80,00	1.394.986.627	80,00	1.348.015.367	80,00	1.370.904.701	80,00	1.439.449.936	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	24	583.440.000			3	999.874.225									
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			4	717.436.675	3	153.909.725	3	161.605.211	3	169.685.472	3	178.169.745	4	187.078.233	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	22.386.537.166			2	200.000.000	1	351.535.651							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	24	70.675.000	30	188.558.840	9	1.430.329.300	9	881.845.765	10	935.938.053	10	1.192.734.956	11	1.252.371.703	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.630.810.000							3	242.391.842					

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	590.823.101	90,00	874.166.396	90,00	1.558.340.954	90,00	1.578.225.495	90,00	1.657.136.770	90,00	1.739.993.608	90,00	1.826.993.289	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	197.178.703	12	337.338.500	48	895.774.254	48	882.530.460	48	926.656.983	48	972.989.832	48	1.021.639.324	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	393.644.398	12	536.827.896	48	662.566.700	48	695.695.035	48	730.479.787	48	767.003.776	48	805.353.965	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	%	100	413.527.784	70,00	1.210.153.784	70,00	1.964.613.518	70,00	2.062.844.194	70,00	2.165.986.404	70,00	2.274.285.725	70,00	2.388.000.011	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	624	292.950.000	208	277.000.000	218	857.100.000	229	899.955.000	240	944.952.750	252	992.200.388	265	1.041.810.407	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			5	780.205.100	5	925.742.850	5	972.029.993	6	1.020.631.492	6	1.071.663.067	6	1.125.246.220	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	306	120.577.784	102	152.948.684	105	181.770.668	108	190.859.201	110	200.402.162	113	210.422.270	116	220.943.384	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebijakan yang Disinergikan	%	33,33	941.918.117													
	Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	17,10		16,70	992.034.178	16,30	1.648.945.198	15,90	481.086.693	15,50	679.183.839	15,10	591.250.409	14,70	812.926.966	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	100,00	41.500.969	100,00	17.223.000	100,00	389.871.950	100,00	76.545.598	100,00	138.236.799	100,00	102.106.280	100,00	158.624.159	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					1	255.000.750									

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	3	8.411.195													
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan			1	17.223.000											
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Midan, SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Midan, SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan							1	26.910.937	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	
Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kabupaten/ Kota							1	25.326.200	1	54.598.127	1	30.057.940	1	66.063.734	
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Laporan							1	24.308.461	1	53.638.672	1	42.048.340	1	52.560.425	
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen	3	33.089.774													
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen					1	134.871.200									

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Program Bangga Kencana yang Tersedia	%	100,0	900.417.148	100,00	974.811.178	100,00	1.259.073.248	100,00	404.541.095	100,00	540.947.040	100,00	489.144.129	100,00	654.302.807	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	45	59.098.500	1	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	72.600.000	2	75.000.000	2	80.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	3	64.723.694	1	42.367.610	2	97.278.025	2	56.541.095	2	69.900.000	2	74.144.129	2	89.302.807	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12	480.600.000	1	486.600.000	1	556.522.425	1	98.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	140.000.000	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	3	247.705.029	2	324.740.784	13	386.710.143	13	120.000.000	13	125.000.000	13	125.000.000	13	135.000.000	
Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	Laporan									1	30.000.000			1	40.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan	72	24.321.000	1	8.292.500	1	23.584.550	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	15	23.968.925	5	52.810.284	5	134.978.105	5	25.000.000	10	63.447.040	6	30.000.000	15	80.000.000	
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Laporan							1	20.000.000	1	30.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	13.432.141.097													
	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	8,38		14,80	9.612.330.868	14,20	9.144.546.365	13,70	11.864.466.471	13,20	10.141.513.541	12,80	11.131.625.261	12,30	12.435.300.704	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%	100,00	1.321.008.365	100,00	1.198.373.600	100,00	1.369.020.000	100,00	1.484.020.000	100,00	1.250.000.000	100,00	1.325.000.000	100,00	1.400.000.000	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12	278.600.000	1	321.300.000	1	321.300.000	1	340.300.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	2	582.400.000	1	399.000.000	1	399.000.000	1	410.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	98.820.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	125.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	3	88.670.365	1	129.353.600	1	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	72	272.518.000	80	248.720.000	80	248.720.000	80	258.720.000	80	250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	4.617.819.146	100,00	4.669.378.960	100,00	5.757.490.562	100,00	6.415.446.471	100,00	5.290.513.541	100,00	5.783.025.261	100,00	6.554.340.704	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	301	1.305.000.000	1740	1.740.000.000	1740	1.740.000.000	1740	1.750.000.000	1740	1.740.000.000	1740	1.740.000.000	1740	1.740.000.000	
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	9	89.794.050	3	102.759.296	3	514.173.250	3	420.000.000	3	462.000.000	3	508.200.000	3	559.020.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	9	3.223.025.096	3	2.826.619.664	3	3.503.317.312	3	4.245.446.471	3	3.088.513.541	3	3.534.825.261	3	4.255.320.704	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	%		5.346.755.602	29,91	3.274.532.000	30,21	1.297.921.627	30,51	805.000.000	30,82	825.000.000	31,12	900.000.000	31,42	975.000.000	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	374.190.000													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	4965	4.952.386.602	6246	3.261.032.000	1815	1.034.369.677	2000	750.000.000	2150	820.000.000	2400	895.000.000	2850	970.000.000	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	37	8.196.000													
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	132	11.983.000													
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan			1	13.500.000	1	263.551.950	1	55.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	100,00	2.146.557.984	100,00	470.046.308	100,00	720.114.176	100,00	3.160.000.000	100,00	2.776.000.000	100,00	3.123.600.000	100,00	3.505.960.000	
	Persentase Kampung Keluarga Berklasifikasi Mandiri	%			1,38		4,14		6,90		9,66		12,41		15,17		
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	3	93.165.984													
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	10	2.053.392.000	3	470.046.308	12	720.114.176	101	3.160.000.000	103	2.776.000.000	103	3.123.600.000	113	3.505.960.000	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang ber-KB	%	84,05	27.781.275.448													
	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%			3,65	26.217.024.843	4,05	8.513.485.501	4,12	18.730.855.896	4,19	19.707.356.948	4,26	20.612.474.073	4,29	21.937.043.997	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Terbina	%	100	1.419.670.838	65,68	2.380.828.143	66,31	2.368.026.736	67,28	2.444.013.280	68,26	2.540.254.608	73,38	2.653.280.070	75,33	2.737.608.076	
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	2	9.090.000	1	9.600.000	1	9.900.000	1	10.600.000	1	10.600.000	1	10.600.000	1	10.600.000	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	183.160.360	2	1.817.364.825	2	453.236.175	2	465.000.000	2	474.400.000	2	499.400.000	2	514.400.000	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	49	331.842.100	15	204.715.100	23	107.661.425	15	118.413.280	15	130.254.608	15	143.280.070	15	157.608.076	
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	2019	663.739.200	750	171.375.000	738	790.500.525	750	800.000.000	750	825.000.000	750	850.000.000	750	875.000.000	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	3	97.689.000	1	79.803.350	1	458.142.500	3	475.000.000	3	500.000.000	3	525.000.000	3	550.000.000	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	67	134.150.178	7	97.969.868	23	548.586.111	23	575.000.000	23	600.000.000	23	625.000.000	23	630.000.000	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	100,00	26.361.604.610	33,33	23.836.196.700	33,33	6.145.458.765	66,67	16.286.842.616	100,00	17.167.102.340	100,00	17.959.194.003	100,00	19.199.435.921	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	6	33.904.610	1	15.896.700											
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	12.537.000.000	1	8.775.900.000	1	3.194.616.700	1	8.856.933.370	1	9.365.697.632	1	9.767.719.060	1	10.598.387.230	
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	1	13.790.700.000	1	15.044.400.000	1	2.716.607.100	1	7.388.267.973	1	7.757.681.372	1	8.145.565.440	1	8.552.843.712	
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan					2	234.234.965	2	41.641.273	2	43.723.336	2	45.909.503	2	48.204.979	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UPT PPA WILAYAH TENGAH (UPT PPA WILAYAH I CIAWI)				237.810.450		338.321.668		1.256.093.908		383.371.570		421.708.727		463.879.599		510.267.559	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	4,37	95.598.500													
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	114.936.000	100,00	521.664.325	100,00	180.343.789	100,00	198.378.167	100,00	218.215.983	100,00	240.037.581	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	95.598.500	100,00	114.936.000	100,00	521.664.325	100,00	180.343.789	100,00	198.378.167	100,00	218.215.983	100,00	240.037.581	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	25	74.598.500	73	113.055.000											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	8	21.000.000	8	1.881.000											
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	159.656.375	100	84.543.789	100	92.998.167	100	102.297.983	100	112.527.781	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	362.007.950	100	95.800.000	100	105.380.000	100	115.918.000	100	127.509.800	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	18.987.400													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100,00	18.987.400													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PendampinganPeningkatan Kualitas HidupAnak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	18.987.400													
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	100.615.000													
	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	114.936.000	100,00	734.429.583	100,00	203.027.781	100,00	223.330.560	100,00	245.663.616	100,00	270.229.978	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	100.615.000													
	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani	%			100,00	114.936.000	100,00	734.429.583	100,00	203.027.781	100,00	223.330.560	100,00	245.663.616	100,00	270.229.978	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota UPT PPA Wilayah Tengah (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	150	73.520.000	60	113.055.000											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah Tengah (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	Layanan	10	27.095.000	8	1.881.000											
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	159.475.275	100	112.527.781	100	123.780.560	100	136.158.616	100	149.774.478	
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pendampingan Korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	574.954.308	100	90.500.000	100	99.550.000	100	109.505.000	100	120.455.500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat			BB	108.449.668											
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%			80,00	46.135.100											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			6	10.748.100											
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	31.942.700											
Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			2	3.444.300											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			90,00	62.314.568											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	13.259.000											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan			12	49.055.568											
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	22.609.550													
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	22.609.550													
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	295	22.609.550													
UPT PPA WILAYAH TIMUR (UPT PPA WILAYAH II JONGGOL)				263.801.500		261.712.368		758.353.300		366.689.169		403.358.085		443.693.892		488.063.281	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	4,37	98.489.000													
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	86.801.000	100,00	317.997.725	100,00	129.797.789	100,00	142.777.567	100,00	157.055.323	100,00	172.760.855	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	98.489.000	100,00	86.801.000	100,00	317.997.725	100,00	129.797.789	100,00	142.777.567	100,00	157.055.323	100,00	172.760.855	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	30	79.489.000	30	84.920.000											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	7	19.000.000	8	1.881.000											
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	46.858.125	100	84.543.789	100	92.998.167	100	102.297.983	100	112.527.781	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	271.139.600	100	45.254.000	100	49.779.400	100	54.757.340	100	60.233.074	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	29.243.500													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100,00	29.243.500													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	29.243.500													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	106.569.000													
	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	86.801.000	100,00	440.355.575	100,00	236.891.380	100,00	260.580.518	100,00	286.638.569	100,00	315.302.426	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	106.569.000													
	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani	%			100,00	86.801.000	100,00	440.355.575	100,00	236.891.380	100,00	260.580.518	100,00	286.638.569	100,00	315.302.426	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	30	79.489.000	60	84.920.000											
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah Timur (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	Layanan	10	27.080.000	8	1.881.000											
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	43.641.725	100	162.488.480	100	178.737.328	100	196.611.060	100	216.272.166	
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pendampingan Korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	396.713.850	100	74.402.900	100	81.843.190	160	90.027.509	165	99.030.260	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat			BB	88.110.368											
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%			80,00	5.054.800											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			6	3.172.750											
Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			2	1.882.050											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi nya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Sesuai dengan Ketentuan	%			80,00	25.000.000											
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit			1	25.000.000											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			90,00	58.055.568											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	9.000.000											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan			12	49.055.568											
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	29.500.000													
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	29.500.000													
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	271	29.500.000													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UPT PPA WILAYAH III CISEENG				175.553.200													
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	2,08	68.451.200													
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	68.451.200													
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	50	49.451.200													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	7	19.000.000													
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	20.770.100													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100,00	20.770.100													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	20.770.100													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100	66.271.800													
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	66.271.800													
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	150	39.181.800													
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	10	27.090.000													
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	20.060.100													
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	20.060.100													
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	331	20.060.100													
UPT PPA WILAYAH IV TAMANSARI				254.255.750													
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	2,08	95.096.965													
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	95.096.965													
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	50	75.111.965													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	7	19.985.000													
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	34.307.690													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100,00	34.307.690													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampinga Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	34.307.690													
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	98.545.395													
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	98.545.395													
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	100	71.450.395													
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	10	27.095.000													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	26.305.700													
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	26.305.700													
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1143	26.305.700													
UPT PPA WILAYAH BARAT (UPT PPA WILAYAH V LEUWISADENG)				238.935.293		380.202.917		907.480.775		926.604.814		972.935.054		1.021.581.807		1.072.660.897	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	2,08	56.461.735													
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	81.305.000	100,00	305.180.925	100,00	320.439.971	100,00	336.461.970	100,00	353.285.068	100,00	370.949.321	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	56.461.735	100,00	81.305.000	100,00	305.180.925	100,00	320.439.971	100,00	336.461.970	100,00	353.285.068	100,00	370.949.321	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat (UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	50	36.161.735	30	71.395.000											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat (UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	7	20.300.000	1	9.910.000											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	86.681.225	100	91.015.286	100	95.566.051	105	100.344.353	110	105.361.570	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	218.499.700	100	229.424.685	100	240.895.919	105	252.940.715	110	265.587.751	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	19.926.808													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100,00	19.926.808													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah V (UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	19.926.808													
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	76.235.700													
	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	148.457.050	100,00	602.299.850	100,00	606.164.843	100,00	636.473.084	100,00	668.296.739	100,00	701.711.576	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	76.235.700													
	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani	%			100,00	148.457.050	100,00	602.299.850	100,00	606.164.843	100,00	636.473.084	100,00	668.296.739	100,00	701.711.576	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat (UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng)	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	330	49.155.700	130	137.439.050											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah Barat (UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng)	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	Layanan	10	27.080.000	30	11.018.000											
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	187.069.850	100	196.423.343	100	206.244.509	105	216.556.735	110	227.384.572	
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pendampingan Korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	415.230.000	100	409.741.500	100	430.228.575	105	451.740.004	110	474.327.004	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat			BB	150.440.867											
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%			80,00	29.189.899											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			6	3.792.707											
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	1.575.349											
Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			2	892.233											
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket			1	2.217.610											
Fasilitasi Kunjungan Tamu UPT PPA Wilayah Barat	Jumla Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			12	1.452.000											
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	19.260.000											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Sesuai dengan Ketentuan	%			80,00	50.000.000											
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	50.000.000											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			90,00	60.580.968											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	11.525.400											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan			12	49.055.568											
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	%			70,00	10.670.000											
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	8.640.000											
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	2.030.000											
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	86.311.050													
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	86.311.050													
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	345	86.311.050													
TOTAL ANGGARAN				83.705.682.546		55.555.873.609		55.038.548.208		65.944.209.403		65.767.467.511		69.372.825.189		74.850.250.488	

TABEL 4.3
SUB KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
			Sub Kegiatan: Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tertanganinya Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Terwujudnya Keluarga Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok PEKKA
			Sub Kegiatan: Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemebelajaran Keluarga (PUSPAGA)

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Sub Kegiatan: Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan P2WKSS
			Sub Kegiatan: Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Kegiatan Itsbat Nikah
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Sosialisasi Profil Gender dan Anak - Rapat Penyusunan Profil Gender dan Anak
			Sub Kegiatan : Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
			Sub Kegiatan : Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terpenuhinya hak anak secara komprehensif	Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi & Pembentukan DEKELA
			Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Pemenuhan Hak Anak
			Sub Kegiatan : Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rakor Gugus Tugas KLA, Rapat Evaluasi Perkluster KLA, Kunjungan Evaluasi Mandiri KLA
			Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekolah Pra Nikah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pertemuan Forum Anak Kecamatan
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Tertanganinya Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan dan sosialisasi pencegahan kasus kekerasan terhadap anak
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
			Sub Kegiatan : Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Workshop Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak
			Sub Kegiatan : pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalnya Angka Kelahiran pada Remaja Umur 15-19 Tahun dalam Menekan Pertumbuhan Jumlah Penduduk	Kegiatan: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan kependudukan tingkat Kabupaten Bogor
			Sub Kegiatan : Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Tersajikannya kebijakan turunan tentang bangga kencana
			Sub Kegiatan : Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Pemahaman kependudukan melalui kerjasama jalur pendidikan formal
			Sub Kegiatan : Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan JenjangSD/Midan, SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Tersusunnya materi kependudukan di jenjang pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Tersajinya data kependudukan tingkat desa/kelurahan
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Kegiatan 1: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Sub Kegiatan: Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Harganas
			Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kegiatan: Pembinaan Program Bangga Kencana, Pengembangan Program Bangga Kencana Bagi PLKB Non ASN, Lomba Apresiasi Program Bangga Kencana

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kegiatan: Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP : IUD,IMPLANT, MOW, MOP) di Fasilitas Kesehatan
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Tercapainya keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Kegiatan: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Sub Kegiatan: Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tersosialisasikannya program K3 kepada mitra

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
DP3AP2KB
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
DP3AP2KB Tahun 2025-2030 terdapat pada Tabel 4.4 dan 4.5.

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA DP3AP2KB

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET (TAHUN)						RUMUS
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	TUJUAN									
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	N/A	0,575	0,572	0,568	0,565	0,562	0,560	$1 - [(Indikator\ Kesehatan\ reproduksi \times 1/3) + (Indikator\ Pemberdayaan \times 1/3) + (Indikator\ Partisipasi\ Angkatan\ Kerja \times 1/3)]$
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	N/A	63,88	64,20	64,52	64,85	65,17	65,50	$(Nilai\ Indeks\ Klaster\ Hak\ Sipil\ dan\ Kebebasan \times 20\%) + (Nilai\ Indeks\ Klaster\ Lingkungan\ Keluarga\ dan\ Pengasuhan\ Alternatif \times 22\%) + (Nilai\ Indeks\ Klaster\ Kesehatan\ Dasar\ dan\ Kesejahteraan \times 18\%) + (Nilai\ Indeks\ Klaster\ Pendidikan,\ Pemanfaatan\ Waktu\ Luang\ dan\ Kegiatan\ Budaya \times 18\%) + (Nilai\ Indeks\ Klaster\ Perlindungan\ Khusus \times 22\%) / 5$
3	Angka kelahiran total (TFR)	Anak	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	$TFR = \frac{1}{1000} \times \left[5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i \right]$ Dengan $ASFR_i = \frac{Bi}{Pi} \times 100$ Bi : Jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur i Pi : jumlah wanita kelompok umur $ASFR_i$:Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET (TAHUN)						RUMUS
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SASARAN									
1	Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi	%	N/A	35,40	35,93	36,47	37,02	37,57	38,14	Jumlah Penduduk perempuan yang bekerja / Jumlah angkatan kerja perempuan x 100
2	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Capaian dari 31 Indikator KLA Pratama = 500-600 Madya = 601-700 Nindya = 701-800 Utama = 801-900 KLA = 901-1000
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))	%	66,39	60,80	61,60	62,30	63,10	63,80	64,60	Jumlah peserta KB Aktif Modern/ Jumlah Pasangan Usia Subur x 100

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI DP3AP2KB

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET	RUMUS
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	%	33,61	33,14	31,00	31,84	31,33	29,76		Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD/Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD x 100
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Jumlah Perempuan korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi / Jumlah Perempuan korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota x 100
3	Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	16,78	33,56	50,34	67,13	83,91	100,00		Jumlah Desa yang diberi Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar / Target Jumlah Desa yang diberi Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar x 100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET	RUMUS
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	6,74	13,47	20,21	26,95	33,68	40,42		Jumlah Pihak yang memanfaatkan data Tahun berkenaan / Jumlah target pihak yang memanfaatkan data hingga akhir periode x 100
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	58,35	59,15	59,85	60,45	60,95	61,35		(Nilai Indeks Klaster Hak Sipil dan Kebebasan+ Nilai Indeks Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif + Nilai Indeks Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan + Nilai Indeks Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)/4
6	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi/Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) X 100
7	Nilai AKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET	RUMUS
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8	Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	16,70	16,30	15,90	15,50	15,10	14,70		$ASFR_{15-19} = \frac{B_{15-19}}{P_{15-19}} \times 1000$ <i>B₁₅₋₁₉</i> :Jumlah kelahiran dari Wanita kelompok umur 15-19 tahun <i>P₁₅₋₁₉</i> :Jumlah wanita kelompok umu 15-19
9	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	14,80	14,20	13,70	13,20	12,80	12,30		Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi/Jumlah Pasangan Usia Subur x 100
10	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	3,65	4,05	4,12	4,19	4,26	4,29		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga/ Jumlah keluarga x 100

BAB V

PENUTUP

Demikian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2025-2030 sebagai implementasi kewenangan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

